

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab terakhir dalam laporan penelitian ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan kelemahan penelitian, serta saran. Ketiga hal tersebut ditulis oleh penulis dengan berpijak pada hasil-hasil penelitian yang sudah dituliskan dalam bab-bab sebelumnya. Singarimbun mengemukakan bahwa bab terakhir biasanya berisi kesimpulan dari hal-hal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Di sini dikemukakan implikasi dari penelitian tersebut dan ada kalanya disarankan pula penelitian lanjutan. Sifatnya berbeda dengan akhtisar yang fungsinya agar pembaca dapat mengetahui dengan cepat hasil penelitian itu sebagai keseluruhan (1989 : 320).

Sebagai bagian dari proses ilmiah, analisa dan interpretasi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini tidak akan lengkap jika tidak disertai dengan generalisasi dan kesimpulan. Tanpa kedua proses itu, penelitian kurang fokus dan tidak memberikan dorongan bagi terciptanya penelitian lanjutan. Dari analisa, peneliti perlu membuat generalisasi dan kesimpulan penelitiannya (Nazir 1983:440). Generalisasi adalah penarikan suatu kesimpulan umum dari analisa penelitian, generalisasi yang dibuat harus berkaitan pula dengan pemikiran yang mendasari penelitian yang dilakukan. Setelah generalisasi dibuat, maka peneliti perlu pula menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian. Lebih lanjut Nazir mengungkapkan peneliti harus cukup hati-hati dalam membuat kesimpulan penelitiannya. Tiap peneliti tidak pernah luput dari bias pribadi, di sana sini bias

pribadi ini ada kalanya mempengaruhi kesimpulan yang ditarik. Selain itu peneliti ilmu-ilmu sosial harus hati-hati sekali dalam menyimpulkan hasil penelitiannya, lebih-lebih karena kesimpulan yang ditarik mempunyai implikasi yang panca muka, baik implikasi ekonomi, politik maupun implikasi sosial (1983:441). Berikut merupakan kesimpulan, keterbatasan dan kelemahan penelitian, dan saran yang berhasil disusun oleh penulis.

## **A. Kesimpulan**

### **1. Kesimpulan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Hubungan Media Oleh Humas DPR RI**

Pengamatan dan analisis yang dilakukan penulis terhadap hasil penelitian memperlihatkan bahwa humas DPR RI sudah maksimal dalam menerapkan program-program hubungan mediana. Humas sudah mampu memfasilitasi wartawan serta bekerjasama secara profesional dengannya dalam mewujudkan aturan peliputan di DPR RI. Beragam informasi yang diberikan oleh humas telah mendapat tanggapan positif dari wartawan, wartawan menilai materi pers yang disediakan oleh humas sungguh baik, mampu memenuhi kebutuhannya dan disusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Koordinator Wartawan DPR RI dianggap oleh wartawan sebagai sarana yang paling nyata dari humas untuk menjalin hubungan baik dengan mereka, dan analisa terhadap data memperlihatkan bahwa hal itu berhasil.

Dari hasil pengamatan dan analisa di atas dapat dibuat generalisasi sebagai berikut : *Pertama*, humas DPR RI dinilai baik oleh wartawan karena telah maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip hubungan media, dengan cara memberikan fasilitas yang lengkap, bertindak profesional, memberi materi pers

yang baik, serta membina hubungan erat dengan wartawan. *Kedua*, humas DPR RI mendapat apresiasi yang positif dari wartawan, atas segala kewajibannya dalam menjalankan tugas dengan baik. *Ketiga*, keberadaan Koordinatoriat Wartawan DPR RI terbukti efektif dan berguna bagi keberlangsungan hubungan baik antara humas dengan wartawan.

Dari generalisasi yang telah dipaparkan diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media oleh humas adalah :

- Humas yang baik akan selalu menerapkan prinsip-prinsip hubungan media, didasarkan pada teori hubungan media yang dikemukakan oleh Frank Jefkins.
- Humas yang baik mampu memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana media untuk menunjang kinerja jurnalistik wartawan. Fasilitas tersebut berupa media center, *press room*, ruang konferensi pers, serta ruang tunggu wartawan.
- Humas yang baik senantiasa bertingkah laku profesional dengan kebenaran, ketepatan, kejujuran, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.
- Humas yang baik mampu memasok berbagai materi pers yang layak dikutip dan diterbitkan oleh wartawan, artinya materi tersebut memenuhi kriteria layak berita dan mengandung formula 5W + 1H (*apa, siapa, mengapa, di mana, bilamana, dan bagaimana*).
- Humas yang baik mampu menjalin hubungan personal yang erat dengan wartawan, dengan mengutamakan kejujuran dan keterbukaan.

- Pengorganisasian wartawan memberikan manfaat yang positif bagi keberlangsungan hubungan baik antara humas dengan wartawan.

## 2. Kesimpulan Atas Persepsi Wartawan Terhadap Humas DPR RI

Pengamatan dan analisis yang dilakukan penulis terhadap hasil penelitian di variabel B ini menunjukkan bahwa secara umum humas DPR RI mendapat persepsi yang baik di benak wartawan koordinatiorat DPR RI. Persepsi tersebut ditunjukkan lewat kesan-kesan positif tentang pekerjaan yang dijalankan oleh humas DPR RI, informasi yang diberikan humas, serta sikap dan tingkah laku humas yang jujur dan bertanggung jawab. Selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan menulis dan berbicara baik yang dimiliki oleh humas DPR RI mampu memunculkan kesan positif pada dirinya di mata wartawan.

Dari hasil pengamatan dan analisa di atas dapat dibuat generalisasi sebagai berikut : *Pertama*, pelaksanaan cara kerja humas DPR RI yang baik dan benar mampu memunculkan kesan positif di benak wartawan. *Kedua*, cara kerja yang baik diciptakan dengan menjalankan dengan sepenuhnya program-program dari humas, khususnya dalam hal ini program hubungan media. *Ketiga*, persepsi positif wartawan koordinatiorat DPR RI terhadap humas tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lewat proses yang berkesinambungan.

Dari generalisasi tersebut kesimpulan yang dapat ditarik mengenai persepsi wartawan terhadap keberadaan humas adalah :

- Humas yang mempunyai cara kerja yang baik akan mendapat kesan positif di benak wartawan.

- Humas yang menjalankan prinsip-prinsip hubungan media dengan baik akan mendapat kesan yang positif dari wartawan.
- Kemampuan berbicara / *public speaking* yang baik akan membentuk kesan yang baik pada diri humas.
- Kemampuan menulis / *writing* yang baik akan membentuk kesan yang baik pada diri humas.

### **3. Kesimpulan Atas Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI**

Di variabel ketiga ini, variabel sikap wartawan terhadap humas DPR RI, penilaian dilakukan atas dasar sikap wartawan yang muncul terhadap humas, terutama sikapnya dalam memandang kinerja humas selama ini. Pengamatan dan analisis yang dilakukan penulis terhadap hasil penelitian di variabel C ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sikap wartawan terhadap humas bernilai positif, terbukti di hampir semua item pertanyaan wartawan menyatakan sikap kesetujuannya terhadap berbagai macam pertanyaan menyangkut humas DPR RI. Fasilitas yang diberikan oleh humas ditanggapi dengan positif oleh wartawan, tidak hanya itu, wartawan juga memberikan sikap positif terhadap hal-hal berikut : cara kerja humas yang baik dan profesional, materi berita yang akurat, serta keberadaan Koordinatoriat Wartawan DPR RI. Namun sikap positif dari wartawan yang telah muncul tidak serta merta membuat wartawan selalu melakukan konfirmasi dengan humas DPR RI sebelum menyusun berita guna menghindari berita yang negatif, wartawan tetap memiliki etika tersendiri yang harus ditaati dan dipatuhi.

Dari hasil pengamatan dan analisa di atas dapat dibuat generalisasi sebagai berikut : *Pertama*, sikap positif wartawan koordinatariat yang timbul terhadap humas DPR RI berhubungan dengan aspek persepsi dan aspek prinsip-prinsip hubungan media. *Kedua*, pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media oleh humas terbukti mampu menciptakan sikap positif wartawan koordinatariat DPR RI. *Ketiga*, sikap positif wartawan koordinatariat tidak membuat berita tentang DPR RI selalu bernada positif, wartawan memiliki etika tersendiri.

Dari generalisasi yang telah dipaparkan diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik mengenai sikap wartawan terhadap humas adalah :

- Humas yang melaksanakan prinsip-prinsip hubungan media (berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Frank Jefkins) akan mendapat tanggapan sikap positif dari wartawan.
- Pemberian fasilitas media yang lengkap oleh humas mampu menimbulkan sikap positif wartawan. Fasilitas tersebut diantaranya media center, *press room*, ruang konferensi pers, serta ruang tunggu wartawan.
- Kinerja humas yang profesional mampu menimbulkan sikap positif wartawan, profesional disini berarti bekerja sesuai dengan etika dan menjunjung tinggi integritas pribadi.
- Materi berita yang lengkap, mengandung kriteria layak berita dan memenuhi unsur 5W+1H disediakan oleh humas mampu menunjang kinerja peliputan wartawan.

- Jalinan hubungan personal yang dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, kerja sama serta sikap saling menghormati profesi masing-masing antara humas dan wartawan mampu menunjang kinerja peliputan wartawan.
- Keberadaan organisasi wartawan di suatu instansi / lembaga / organisasi yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan wartawan mampu menunjang kinerja peliputan wartawan.
- Wartawan tetap bersikap untuk berpegang pada prinsip obyektivitas dalam melaporkan suatu peristiwa atau kejadian, tidak terpengaruh dengan jalinan hubungannya dengan humas.

#### **4. Kesimpulan Atas Hubungan Variabel Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A) Dengan Variabel Persepsi Wartawan Terhadap Humas DPR RI (B)**

Pengamatan dan analisis yang dilakukan penulis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara prinsip-prinsip hubungan media terhadap persepsi wartawan terhadap humas DPR RI adalah 85%. Berdasarkan koefisien hubungan Young, tingkat koefisien korelasi antara A dan B ini tergolong tinggi, karena terletak antara 0.70 – 1.00. Selain itu, koefisien korelasi variabel A dan B juga dinyatakan signifikan, sebab nilai Sig ini jika kita bandingkan dengan alpha (5% atau 0.05) lebih kecil, sehingga keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$ .

Sedangkan analisis terhadap hasil koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0.727. Dari hasil output ini terlihat bahwa 72,7 % persepsi

wartawan terhadap humas DPR RI dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hubungan media yang dilaksanakan oleh humas tersebut. Sedangkan prosentase sebesar 27,3 % menyatakan bahwa persepsi wartawan yang terbentuk terhadap humas DPR RI dipengaruhi oleh faktor lain. Koefisien determinasi ini juga signifikan secara statistik sebab F hitung (87,842) lebih besar daripada F tabel (4,17) dan Sig (0.00) yang lebih kecil daripada alpha (0.05).

Terakhir, analisis dilakukan terhadap hasil regresi sederhana. Dari sini diperoleh :  $B = 3.077 + 0.412 A$ . Dari hasil ini dapat ditafsirkan bahwa koefisien prinsip-prinsip hubungan media (A) mencapai 0.412, dan itu berarti setiap humas DPR RI melaksanakan salah satu dari prinsip-prinsip hubungan media, maka pengalaman wartawan tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan terhadap humas DPR RI meningkat sebesar 41%. Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F memperlihatkan nilai nilai F hitung variabel A dan B adalah sebesar 87.842 dengan nilai signifikan F adalah 0,00. Hasil tersebut jika dianalisis menghasilkan keputusan bahwa variabel pengaruh signifikan dalam memprediksi nilai variabel terpengaruh, dan diantara variabel A dan B terdapat hubungan yang linier.

Dari hasil pengamatan dan analisa di atas dapat dibuat generalisasi sebagai berikut : *Pertama*, terdapat keeratan hubungan yang tinggi dan signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media oleh humas DPR RI terhadap persepsi wartawan koordinatoriat terhadap humas. *Kedua*, persepsi wartawan koordinatoriat terhadap humas DPR RI dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hubungan



media yang dilaksanakan oleh humas tersebut. *Ketiga*, setiap humas DPR RI melaksanakan salah satu dari prinsip-prinsip hubungan media, maka pengalaman wartawan tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan terhadap humas DPR RI meningkat secara signifikan.

Dari generalisasi tersebut di atas kesimpulan yang dapat ditarik mengenai hubungan antara pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media oleh humas dengan persepsi wartawan yang muncul adalah :

- Terdapat hubungan yang erat antara pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media oleh humas dengan kesan yang terbentuk di benak wartawan.
- Pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media oleh humas memberikan pengaruh yang kuat terhadap kesan yang terbentuk di dalam diri wartawan.
- Humas yang melaksanakan prinsip-prinsip hubungan media akan mendapat kesan positif di benak wartawan.
- Hipotesis kerja (H<sub>k</sub>) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel prinsip-prinsip hubungan media (A) dengan variabel persepsi wartawan terhadap humas DPR RI (B) terbukti.
- Kesan positif wartawan akan bertambah secara signifikan bila humas melaksanakan salah satu dari prinsip-prinsip hubungan media, begitu seterusnya hingga kesan positif tersebut dikatakan sempurna (100%).

## **5. Kesimpulan Atas Hubungan Variabel Persepsi Wartawan Terhadap Humas DPR RI (B) Dengan Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI (C)**

Pengamatan dan analisis yang dilakukan penulis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat keeratan hubungan antara persepsi wartawan terhadap humas DPR RI dengan sikap wartawan terhadap humas DPR RI sebesar 85%. Berdasarkan koefisien hubungan Young, tingkat koefisien korelasi antara B dan C ini tergolong tinggi, karena terletak antara 0.70 – 1.00. Selain itu, koefisien korelasi variabel B dan C juga dinyatakan signifikan, sebab nilai Sig ini jika kita bandingkan dengan alpha (5% atau 0.05) lebih kecil, sehingga keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$ .

Pengamatan terhadap hasil analisis koefisien determinasi sebesar 0.724. menyatakan bahwa, 72.4 % sikap wartawan terhadap humas DPR RI dipengaruhi oleh persepsi yang telah terbentuk di benak wartawan terhadap humas DPR RI. Koefisien determinasi ini signifikan secara statistik sebab F hitung (86.425) lebih besar daripada F tabel (4,17) dan Sig (0.00) yang lebih kecil daripada alpha (0.05).

Analisis yang dilakukan terhadap regresi sederhana menunjukkan hasil  $C = 5.599 + 0.809 B$ . Artinya setiap muncul persepsi wartawan terhadap humas DPR RI, maka kemunculan tersebut juga dibarengi dengan penunjukan sikap tertentu pula, sikap yang dimaksud di sini adalah sikap positif wartawan terhadap humas DPR RI sebesar 80 %. Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F memperlihatkan nilai nilai F hitung variabel B dan C adalah sebesar 86.425

dengan nilai signifikan F adalah 0,00. Selain itu, di antara variabel B dan variabel C terdapat hubungan yang linier.

Dari hasil pengamatan dan analisa di atas dapat dibuat generalisasi sebagai berikut : *Pertama*, terdapat keeratan hubungan yang tinggi dan signifikan antara persepsi yang terbentuk terhadap humas DPR RI dengan sikap wartawan koordinatiorat terhadap humas DPR RI. *Kedua*, sikap yang muncul pada diri wartawan koordinatiorat terhadap humas DPR RI dipengaruhi oleh kesan yang selama ini tertanam di dalam benaknya. *Ketiga*, terdapat hubungan yang linier antara variabel B dan variabel C, setiap muncul kesan yang positif maka hal itu akan dibarengi dengan munculnya sikap yang positif pula.

Kesimpulan yang ditarik adalah :

- Kesan akan terbentuk sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana humas mampu membangun persepsi yang didasarkan oleh realitas yang terjadi
- Kesan yang positif akan mengakibatkan munculnya sikap yang positif.
- Jika humas ingin mendapat sikap positif dari wartawan maka humas perlu menanamkan citra / kesan / persepsi yang positif terlebih dahulu di benak wartawan.
- Hipotesis kerja (Hk) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi wartawan terhadap humas DPR RI (B) dengan variabel sikap wartawan terhadap humas DPR RI (C) terbukti

## **6. Kesimpulan Atas Hubungan Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media**

### **(A) Dengan Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI (C)**

Hasil analisis menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara penerapan prinsip-prinsip hubungan media oleh humas DPR RI dengan sikap wartawan terhadap humas DPR RI adalah 88%. Berdasarkan koefisien hubungan Young, tingkat koefisien korelasi antara A dan C ini tergolong tinggi, karena terletak antara 0.70 – 1.00. Selain itu, koefisien korelasi variabel A dan C juga dinyatakan signifikan, sebab nilai Sig ini jika kita bandingkan dengan alpha (5% atau 0.05) lebih kecil, sehingga keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$ .

Sementara, koefisien determinasi variabel A – C adalah sebesar 0.777. Dari hasil t ini dapat diperinci bahwa 77,7 % sikap wartawan terhadap humas DPR RI dipengaruhi oleh pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media oleh humas DPR RI, dan hanya 22,3 % yang dipengaruhi oleh faktor lain. Koefisien determinasi ini juga signifikan secara statistik sebab F hitung (115.072) lebih besar daripada F tabel (4,17) dan Sig (0.00) yang lebih kecil daripada alpha (0.05).

Di variabel A – C persamaan regresi yang diperoleh : Koefisien prinsip-prinsip hubungan media adalah 0.405 artinya setiap humas DPR RI melalui Bagian pemberitaan dan penerbitan melaksanakan prinsip-prinsip hubungan media, sikap yang ditunjukkan oleh wartawan terhadapnya meningkat sebesar 0.405 atau 40 %. Hasil pengujian ANOVA dengan menggunakan uji F memperlihatkan nilai nilai F hitung variabel A dan C adalah sebesar 115.072 dengan nilai signifikan F adalah 0,00, jadi terdapat hubungan yang linier.

Dari hasil pengamatan dan analisa di atas dapat dibuat generalisasi sebagai berikut : *Pertama*, terdapat keeratan hubungan yang tinggi dan signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media dengan sikap wartawan koordinatiorat terhadap humas DPR RI. *Kedua*, sikap yang muncul pada diri wartawan koordinatiorat terhadap humas DPR RI dipengaruhi oleh program-program hubungan media yang dijalankan humas. *Ketiga*, terdapat hubungan yang linier antara sikap dan pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media, setiap humas DPR RI melaksanakan salah satu dari prinsip-prinsip hubungan media maka sikap wartawan terhadapnya semakin bertambah positif.

Dari generalisasi tersebut kesimpulan yang dapat ditarik mengenai hubungan antara pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media dengan sikap wartawan yang muncul terhadap humas adalah :

- Terdapat hubungan yang erat antara pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media oleh humas dengan sikap yang ditampakkan oleh wartawan.
- Pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan media oleh humas memberikan pengaruh yang kuat terhadap sikap yang terbentuk di dalam diri wartawan
- Humas yang melaksanakan prinsip-prinsip hubungan media akan memunculkan sikap yang positif dalam diri wartawan, yaitu mau bekerja sama dengan humas.
- Hipotesis kerja (Hk) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel prinsip-prinsip hubungan media (A) dengan variabel sikap wartawan terhadap humas DPR RI (C) terbukti.

## **7. Kesimpulan Atas Variabel Antara**

Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa koefisien determinasi dari suatu variabel terhadap variabel yang diduga sebagai variabel antara tersebut **tidak lebih besar** daripada nilai koefisien determinasi dari variabel termaksud ke variabel akhir. Dari hasil uji dan analisis diperoleh bahwa  $R^2_{AB}$  tidak lebih besar dari  $R^2_{AC}$ , dan  $R^2_{AB}$  tidak lebih besar dari  $R^2_{BC}$ . Dengan demikian variabel (B) dalam hubungan linier A – B – C tidak bertindak sebagai variabel antara, walaupun dalam penghitungan sebelumnya dinyatakan bahwa variabel (B) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kedua variabel lainnya.

Dengan hasil tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hipotesis kerja ( $H_k$ ) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel persepsi wartawan terhadap humas DPR RI (B) terbukti berperan sebagai variabel antara dalam penelitian ini tidak terbukti atau **ditolak**. Sebaliknya, Hipotesis nol ( $H_0$ ) penelitian yang menyatakan bahwa variabel persepsi wartawan terhadap humas DPR RI (B) tidak berperan sebagai variabel antara dalam penelitian ini terbukti atau **diterima**.

## **B. Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian**

### **1. Keterbatasan Penelitian**

Metode penelitian ini adalah survei, maka unit analisisnya adalah individu yang secara sosial dipengaruhi oleh banyak faktor. Sedangkan dalam penelitian ini hanya terdapat 3 variabel yaitu prinsip-prinsip hubungan media, persepsi wartawan terhadap humas DPR RI, dan sikap wartawan terhadap humas DPR RI.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemui banyak hambatan dan keterbatasan khususnya untuk menemukan wartawan untuk diberikan kuesioner. Wartawan banyak yang tidak rutin berada di gedung DPR RI, sehingga penulis banyak menghabiskan waktu untuk mencari dan menunggu para wartawan. Namun, penulis sangat terbantu dengan langkah yang dilakukan oleh humas DPR RI (lewat Sub Bag Penerangan), mereka membantu penulis menghubungi dan memberikan kuesioner. Pada beberapa responden kuesioner diberikan dalam bentuk email.

Selain itu keterbatasan (limitasi) model penelitian dimungkinkan menjadi sebab munculnya pemahaman bahwa dalam konsep permasalahan yang terjadi adalah hubungan antara 3 variabel, dan bukan per 2 variabel. Pemahaman seperti ini menyebabkan munculnya hitungan secara statistik yang menyatakan bahwa variabel B bukan merupakan variabel antara bagi hubungan antara variabel A - C.

## **2. Kelemahan Penelitian**

Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak adanya obyek pembanding. Yang dimaksud adalah tidak adanya hasil pembanding penelitian serupa yang dilakukan di instansi lain, terutama yang bersifat swasta (perusahaan). Jika bisa dibandingkan tentu akan memberikan hasil yang lebih maksimal dan dapat lebih diyakini keakuratannya.

Selain itu untuk metode yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana, tidak bisa menjelaskan seberapa besar variabel prinsip-prinsip hubungan media dalam mempengaruhi variabel terikat lainnya. Sehingga hal ini tidak bisa

digunakan untuk menentukan bagaimana seharusnya membuat dan melaksanakan prinsip-prinsip hubungan media secara efektif.

### C. Saran

1. Untuk lebih dapat meningkatkan citra dan persepsi humas DPR RI di mata wartawan, maka sebaiknya ke depan humas lebih bisa memahami dan mengetahui karakteristik masing-masing media yang wartawannya menjadi anggota Koordinatoriat Wartawan DPR RI. Hal ini perlu dilakukan agar humas dapat membedakan kebutuhan berita antara satu media dengan media yang lain. Karakteristik media dapat dilihat dari fokus atau peliputan berita, koordinasi peliputan dan penugasan, materi / isi berita, rubrik dan artikel, hingga tipe *lay out*.
2. Ketegasan humas DPR RI dalam menyikapi fenomena uang sogok lebih diperjelas lagi. Humas DPR RI hendaknya tidak mempraktekkan pemberian uang amplop kepada wartawan. Selain itu diharap humas mampu memberikan anjuran dan himbauan kepada anggota dewan agar jangan mempraktekkan *money politics* kepada wartawan. Mengapa demikian? Sebab yang sering memberi wartawan uang justru langsung dari nara sumber sendiri yaitu para anggota DPR RI, agar wartawan memuat berita sesuai dengan kepentingannya.
3. Humas DPR RI ke depan hendaknya lebih memberikan kesempatan kepada wartawan untuk melakukan memeriksa ulang (*check and recheck*) kebenaran dari materi berita yang telah diberikan, hal ini dapat direalisasikan dengan cara



memberikan kemudahan bagi wartawan untuk melakukan *cross check* terhadap sumber berita secara langsung.

4. Keserasian dan keindahan penampilan para petugas humas DPR RI hendaknya ditingkatkan di kemudian hari. Humas merupakan garda depan lembaga dalam menerima dan melayani siapapun yang datang ke Gedung DPR RI, dan sudah sepantasnyalah humas berpenampilan menarik agar publik memiliki respon yang positif terhadapnya.
5. Akan lebih baik jika peneliti berikutnya dapat mengembangkan metode yang digunakan yaitu menggunakan metode Path analisis dalam menerangkan *prinsip-prinsip hubungan media-nya* Frank Jefkins. Sehingga diharapkan dengan menggunakan Path Analisis dapat mengetahui apa saja faktor-faktor mana saja dalam prinsip-prinsip hubungan media yang paling efektif dalam mempengaruhi sikap dan persepsi wartawan.
6. Dalam mencari besarnya pengaruh hubungan antar variabel, penelitian ini hanya memfokuskan pada koefisien determinasi yang dominan / besar. Akan lebih baik jika di penelitian lanjutan dilakukan analisa dan interpretasi terhadap sisa koefisien determinasi yang tidak dominan tersebut. Diharapkan akan diketahui dengan lengkap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran hubungan antar 2 (dua) variabel.
7. Penelitian ini menggunakan skala ordinal sebagai skala pengukuran, walaupun sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil penghitungan statistik namun perlu (untuk penelitian berikutnya) dilakukan *dummy* dari skala ordinal ke skala interval. Jika sudah demikian, maka penghitungan data secara

statistik dapat dilakukan dengan Uji Regresi Berganda (*multiple regression*) dan Uji T-Tes. Dengan metode analisa data yang seperti ini diharapkan dapat semakin memperjelas keadaan hubungan antar variabel dengan lebih rinci dan detail.

Demikian kesimpulan serta saran-saran yang dibuat oleh penulis berdasar hasil penelitian yang telah dibuat. Semoga secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap ilmu komunikasi, konsentrasi studi hubungan masyarakat tentang pengaruh hubungan media terhadap persepsi dan sikap wartawan (media) terhadap humas (organisasi). Semoga pula hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan, pertimbangan, dalam membuat program hubungan media yang memiliki pengaruh lebih positif pada wartawan di masa yang akan datang, baik bagi lembaga DPR RI maupun organisasi / instansi / perusahaan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Black, Sam dan Melvin L. Sharpe. 1998. *Ilmu Hubungan Masyarakat Praktis*. Jakarta : Intermasa.
- Bag. Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI. 2001. *Buku Saku Wartawan DPR RI*. Jakarta.
- Biro Humas dan Hukum Setjen DPR RI. 2001. *Booklet Selayang Pandang Gedung MPR / DPR RI*. Jakarta.
- Biro Humas dan Hukum Setjen DPR RI. 2001. *Booklet Mekanisme Kerja DPR RI*. Jakarta.
- Cutlip, Scott M; Allen H. Center, dan Glen M. Broom. 2000. *Effective Public Relations, Edisi Kedelapan*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Effendy, Onong Uchajana. 1992. *Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ispandriarno, Lukas; Thomas Hanitzsch dan Martin Loeffelholz. 2002. *Media – Militer – Politik*. Yogyakarta : Galang Press
- Jefkins, Frank. 1995. *Public Relations*, Jakarta : Erlangga.
- Kasali, Rhenald. 1994. *Manajemen Public Relations : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Kotler, Philip. 1996. *Marketing Management, an Asia Perspective*.
- Margantoro, YB. 2003. *Hubungan dengan Media*. Yogyakarta : Bernas.
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Onggo, Bob Julius. 2004. *Cyber Public Relations*. Jakarta : PT Gramedia.

Putra, I Gusti Ngurah. 1999. *Manajemen Hubungan Masyarakat*. Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rakhmat, Jalaluddin. 1991. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Santosa, Purbayu Budi dan Ashari, 2005. *Analisa Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta : Penerbit ANDI

Sears, David; Jonathan Freedman dan L. Anne Peplau. 1988. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES

Siregar, Ashadi. 1998. *Dasar-Dasar Penulisan Berita*. Yogyakarta : Kanisius.

Sulaiman, Wahid. 2004. *Analisis regresi Menggunakan SPSS, Contoh Kasus dan Pemecahannya*. Yogyakarta : Penerbit ANDI

Wasesa, Silih Agung. 2005. *Strategi Public Relations*. Jakarta : PT. Gramedia.

#### **ARTIKEL**

Kasali, Rhenald. 2003. *Membangun Reputasi Brand Dengan PR*. Suara Pembaharuan. 11 Juni 2003.

Sanjaya, Robert. 2004. *PR Tak Sekedar Buat Acara*. Majalah Marketing.

Soelaeman, Henni T. *Menampilkan Citra Positif Perusahaan*. Artikel Lepas di Internet.

**TULISAN TAK DITERBITKAN**

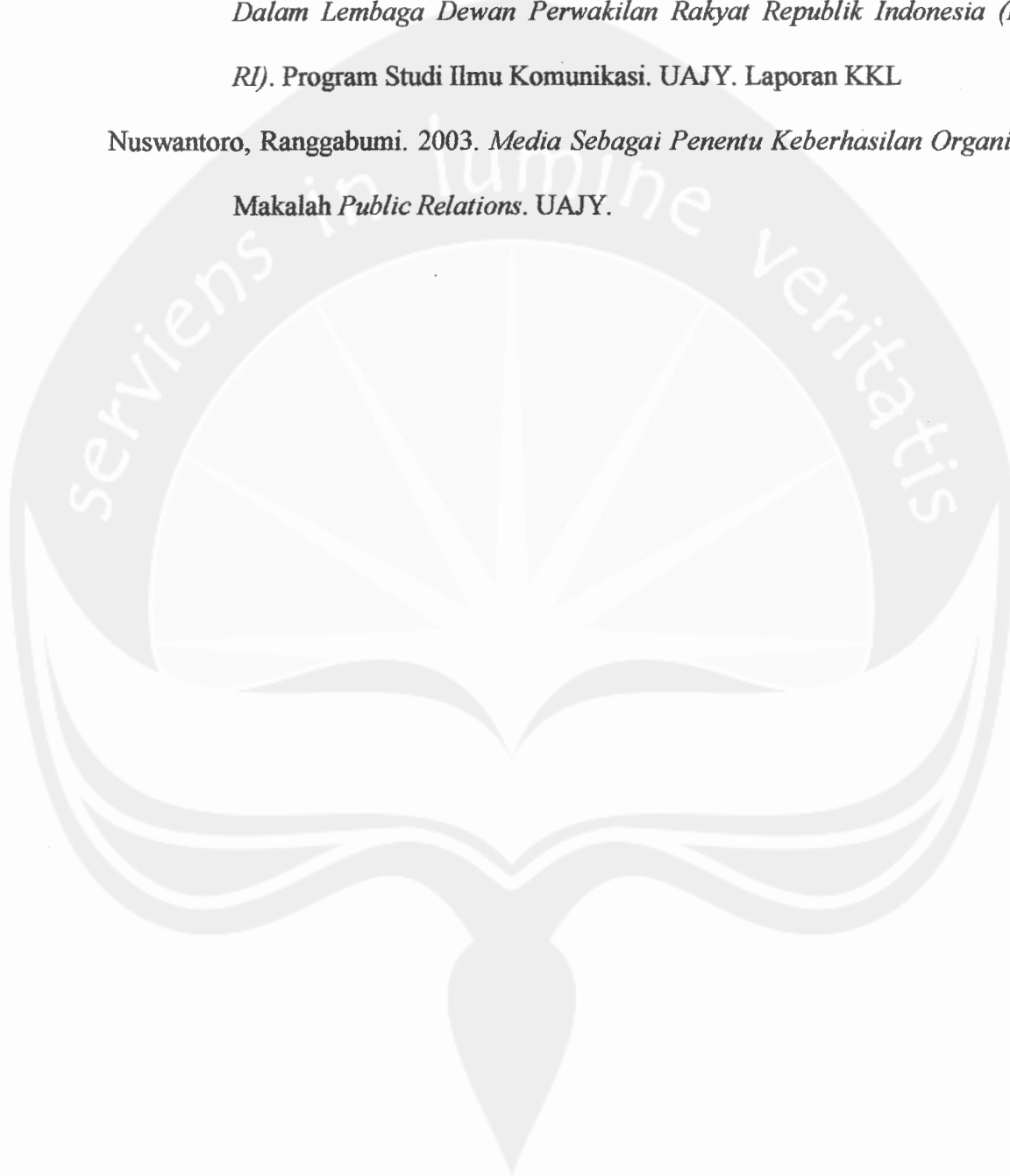
Nuswantoro, Rangabumi. 2005. *Konsep dan Aplikasi Manajemen Public Relations*

*Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR*

*RI). Program Studi Ilmu Komunikasi. UAJY. Laporan KKL*

Nuswantoro, Rangabumi. 2003. *Media Sebagai Penentu Keberhasilan Organisasi.*

*Makalah Public Relations. UAJY.*





*serviens in lumine veritatis*

**LAMPIRAN**



# **LAMPIRAN 1**

**Matriks Penelitian dan Bagan Hubungan Antar Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Faktor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Draft Pertanyaan</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
<b>A. PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN MEDIA</b>	1. Pemahaman dan Pelayanan Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami kebijakan editorial media</li> <li>b. Memahami karakteristik media</li> <li>c. Memberikan pelayanan kepada media</li> <li>d. Memberikan fasilitas kantor pers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Humas DPR RI memahami kebijakan editorial tiap-tiap media</li> <li>• Humas DPR RI mengetahui karakteristik khalayak pembaca suatu media</li> <li>• Humas DPR RI menjalin hubungan baik dengan redaktur tiap-tiap media</li> <li>• Humas DPR RI menyediakan fasilitas pers yang lengkap bagi wartawan</li> <li>• Humas DPR RI senantiasa bekerja sama dengan wartawan dalam merancang aturan peliputan</li> </ul>	Diukur dengan Skala Ordinal, menggunakan Metode Perbedaan Semantik
	2. <i>Professionalisme Public Relations</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan etika tingkah laku profesional</li> <li>b. Menghindari kegiatan suap-menyuap</li> <li>c. Mendasarkan diri pada fakta</li> <li>d. Menyampaikan sesuatu dengan obyektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Humas DPR RI bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di DPR RI</li> <li>• Humas DPR RI pantang memberi uang sogok pada wartawan</li> <li>• Humas DPR RI memberikan informasi berdasarkan fakta</li> <li>• Humas DPR RI memberikan informasi yang berimbang tentang segala hal yang terjadi di DPR RI</li> </ul>	Diukur dengan Skala Ordinal, menggunakan Metode Perbedaan Semantik



3. Materi Pers	<p>a. Materi yang diberikan memenuhi kepentingan pers</p> <p>b. Materi yang diberikan mencerminkan fakta</p> <p>c. Materi pers mengandung nilai berita</p> <p>d. Materi pers ditulis dengan ringkas serta mengandung 5W+1H</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materi pers yang diberikan humas memenuhi kepentingan wartawan</li> <li>• Materi pers yang diberikan humas bebas dari kepentingan pribadi</li> <li>• Materi pers yang diberikan humas memenuhi kriteria layak berita</li> <li>• Materi pers yang diberikan humas ditulis dan disusun secara ringkas dan jelas</li> </ul>	Diukur dengan Skala Ordinal, menggunakan Metode Perbedaan Semantik
4. Penyediaan Salinan	Salinan materi pers selalu mencukupi kebutuhan wartawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Humas DPR RI memberikan salinan materi berita (mis : <i>press release</i>) dalam jumlah yang cukup bagi wartawan</li> <li>• Humas DPR RI menyediakan salinan foto-foto (sebagai pelengkap materi berita) dalam jumlah yang cukup bagi wartawan</li> </ul>	Diukur dengan Skala Ordinal, menggunakan Metode Perbedaan Semantik
5. Verifikasi	Pembuktian kembali setiap materi pers yang diterima wartawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Humas DPR RI memberikan kesempatan pada wartawan untuk memeriksa ulang (<i>check and recheck</i>) kebenaran dari materi berita yang telah diberikan</li> </ul>	Diukur dengan Skala Ordinal, menggunakan Metode Perbedaan Semantik

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Humas DPR RI memberikan kemudahan bagi wartawan untuk melakukan <i>cross check</i> terhadap sumber berita secara langsung</li> </ul>	<p>Diukur dengan Skala Ordinal, menggunakan Metode Perbedaan Semantik</p>
6. Hubungan Personal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjalin hubungan dengan terbuka</li> <li>Pemanfaatan daya tarik fisik</li> <li>Penghargaan terhadap hubungan dengan wartawan</li> <li>Menjalin hubungan yang saling melengkapi (<i>complementary</i>)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Humas DPR RI berlaku jujur dan terbuka terhadap wartawan</li> <li>Humas DPR RI memiliki daya tarik fisik yang menarik bagi para wartawan</li> <li>Humas DPR RI menghargai keberadaan wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan DPR RI</li> <li>Antara humas DPR RI dan wartawan terjalin hubungan yang saling bantu membantu</li> </ul>		<p>Diukur dengan Skala Ordinal, menggunakan Metode Perbedaan Semantik</p>
<b>B. PERSEPSI</b> Persepsi Wartawan Koordinatoriat DPR RI Terhadap Humas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesan tentang kemampuan memahami media</li> <li>Kesan tentang profesionalitas humas DPR RI</li> <li>Kesan tentang materi pers yang disajikan humas DPR RI</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Humas DPR RI memahami kepentingan wartawan / reporter dengan baik</li> <li>Humas DPR RI memberikan informasi yang tepat dan akurat pada wartawan</li> <li>Humas DPR RI melayani kebutuhan wartawan dengan sepenuh hati</li> </ul>		<p>Diukur dengan Skala Ordinal, menggunakan Metode Perbedaan Semantik</p>

<p><b>C. SIKAP WARTAWAN</b></p>	<p>Sikap Wartawan Koordinatoriat DPR RI Terhadap Organisasi</p>	<p>d. Kesan tentang penyediaan salinan materi pers  e. Kesan tentang verifikasi di DPR RI  f. Kesan tentang hubungan personal yang dijalin dengan humas DPR RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Humas DPR RI dalam menjalankan profesinya taat pada peraturan yang berlaku di DPR RI</li> <li>• Humas DPR RI dalam menjalankan profesinya memberikan kesan jujur</li> <li>• Humas DPR RI dalam menjalankan profesinya memberikan kesan bertanggung jawab</li> <li>• Humas DPR RI memiliki penampilan fisik yang menarik</li> <li>• Humas DPR RI memiliki kemampuan menulis baik</li> <li>• Humas DPR RI memiliki kemampuan berbicara baik</li> </ul>	
		<p>a. Respon terhadap humas DPR RI  b. Pengadaan kerjasama antara wartawan dengan humas DPR RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wartawan mengetahui dengan baik tentang keberadaan humas DPR RI</li> <li>• Fasilitas media yang disediakan humas DPR RI menunjang kinerja peliputan wartawan</li> <li>• Cara kerja humas DPR RI yang baik menunjang kinerja peliputan wartawan</li> <li>• Materi berita yang disediakan oleh humas DPR RI menunjang kinerja peliputan wartawan</li> </ul>	<p>Diukur dengan Skala Ordinal, menggunakan Metode Perbedaan Semantik</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan salinan berita yang diberikan oleh humas DPR RI (berupa foto-foto, <i>fotocopy</i> jadwal-jadwal sidang, dan lain sebagainya) menunjang kinerja peliputan wartawan</li> <li>• Kebebasan untuk melakukan verifikasi / <i>check &amp; recheck</i> menunjang kinerja peliputan wartawan</li> <li>• Jalanan hubungan personal dengan Humas DPR RI menunjang kinerja peliputan wartawan</li> <li>• Keberadaan koordinatiorat wartawan DPR RI menunjang kinerja peliputan wartawan</li> <li>• Wartawan dalam meliput peristiwa atau kejadian di DPR RI akan selalu konfirmasi dengan humas DPR RI untuk menghindari berita yang negatif</li> </ul>	
--	--	--	---	--

**Kuesioner Untuk Penelitian**  
**“STUDI TENTANG WARTAWAN DAN HUMAS DI DPR RI”**

Kepada  
Yth. Responden  
di tempat

Dengan hormat,

Kuesioner ini dibuat sebagai sarana penelitian untuk penyusunan tugas akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “STUDI TENTANG WARTAWAN DAN HUMAS DI DPR RI ( Penelitian Tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip Hubungan Media Pada Sikap Serta Persepsi Wartawan Koordinator DPR RI Terhadap Humas DPR RI )”.

Dengan ini saya mohon kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini. Terima kasih atas bantuan dan perhatian yang saudara berikan.

Yogyakarta, Desember 2005

Peneliti

**A. Petunjuk**

1. baca pertanyaan dengan teliti dan sebaik-baiknya
2. jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada tempat yang telah tersedia
3. beri tanda check atau tanda silang (dengan huruf “v” atau “x”) pada pilihan jawaban yang menurut anda paling mewakili pendapat anda
4. isilah soal dengan cermat dan teliti, jangan sampai ada pertanyaan yang terlewat dan tidak diisi
5. untuk pengisian lewat email, mohon untuk mengirimkan kuesioner ini kembali ke alamat [rangga\\_bn@yahoo.com](mailto:rangga_bn@yahoo.com)

**B. Data Responden**

1. Nama responden : .....
2. Wartawan dari media : ..... (tuliskan media dimana saudara bekerja)

### A. Prinsip=Prinsip Hubungan Media

STS= Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, R = Ragu-ragu, S = Setuju  
SS = Sangat Setuju

#### Faktor Pemahaman dan Pelayanan Media

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
3	Humas DPR RI memahami kebijakan editorial tiap-tiap media					
4	Humas DPR RI mengetahui karakteristik khalayak pembaca suatu media					
5	Humas DPR RI menjalin hubungan baik dengan redaktur tiap-tiap media					
6	Humas DPR RI menyediakan fasilitas pers yang lengkap bagi wartawan					
7	Humas DPR RI senantiasa bekerja sama dengan wartawan dalam merancang aturan peliputan					

#### Faktor Profesionalisme Humas DPR RI

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
8	Humas DPR RI bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di DPR RI					
9	Humas DPR RI pantang memberi uang sogok pada wartawan					
10	Humas DPR RI memberikan informasi berdasarkan fakta					
11	Humas DPR RI memberikan informasi yang berimbang tentang segala hal yang terjadi di DPR RI					

#### Faktor Materi Pers

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
12	Materi pers yang diberikan humas memenuhi kepentingan wartawan					
13	Materi pers yang diberikan humas bebas dari kepentingan pribadi					
14	Materi pers yang diberikan humas memenuhi kriteria layak berita					
15	Materi pers yang diberikan humas ditulis dan disusun secara ringkas dan jelas					

### Faktor Penyediaan Salinan

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
16	Humas DPR RI memberikan salinan materi berita (mis : <i>press release</i> ) dalam jumlah yang cukup bagi wartawan					
17	Humas DPR RI menyediakan salinan foto-foto (sebagai pelengkap materi berita) dalam jumlah yang cukup bagi wartawan					

### Faktor Verifikasi

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
18	Humas DPR RI memberikan kesempatan pada wartawan untuk memeriksa ulang ( <i>check and recheck</i> ) kebenaran dari materi berita yang telah diberikan					
19	Humas DPR RI memberikan kemudahan bagi wartawan untuk melakukan <i>cross check</i> terhadap sumber berita secara langsung					

### Faktor Hubungan Personal

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
20	Humas DPR RI berlaku jujur dan terbuka terhadap wartawan					
21	Humas DPR RI memiliki daya tarik fisik yang menarik bagi para wartawan					
22	Humas DPR RI menghargai keberadaan wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan DPR RI					
23	Antara humas DPR RI dan wartawan terjalin hubungan yang saling bantu membantu					

### B. Variabel Persepsi

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, R = Ragu-ragu, S = Setuju  
SS = Sangat Setuju

No	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
24	Humas DPR RI memahami kepentingan wartawan / reporter dengan baik					
25	Humas DPR RI memberikan informasi yang tepat dan akurat pada wartawan					

26	Humas DPR RI melayani kebutuhan wartawan dengan sepenuh hati					
27	Humas DPR RI dalam menjalankan profesinya taat pada peraturan yang berlaku di DPR RI					
28	Humas DPR RI dalam menjalankan profesinya memberikan kesan jujur					
29	Humas DPR RI dalam menjalankan profesinya memberikan kesan bertanggung jawab					
30	Humas DPR RI memiliki penampilan fisik yang menarik					
31	Humas DPR RI memiliki kemampuan menulis baik					
32	Humas DPR RI memiliki kemampuan berbicara baik					

### C. Variabel Sikap Wartawan Media Terhadap Organisasi

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, R = Ragu-ragu, S = Setuju  
 SS = Sangat Setuju

No	Pertanyaan	STB	TB	R	B	SB
33	Wartawan mengetahui dengan baik tentang keberadaan humas DPR RI					
34	Fasilitas media yang disediakan humas DPR RI menunjang kinerja peliputan wartawan					
35	Cara kerja humas DPR RI yang baik menunjang kinerja peliputan wartawan					
36	Materi berita yang disediakan oleh humas DPR RI menunjang kinerja peliputan wartawan					
37	Kelengkapan salinan berita yang diberikan oleh humas DPR RI (berupa foto-foto, fotocopy jadwal-jadwal sidang, dan lain sebagainya) menunjang kinerja peliputan wartawan					
38	Kebebasan untuk melakukan verifikasi / <i>check &amp; recheck</i> menunjang kinerja peliputan wartawan					
39	Jalinan hubungan personal dengan Humas DPR RI menunjang kinerja peliputan wartawan					
40	Keberadaan koordinatariat wartawan DPR RI menunjang kinerja peliputan wartawan					
41	Wartawan dalam meliput peristiwa atau kejadian di DPR RI akan selalu konfirmasi dengan humas DPR RI untuk menghindari berita yang negatif					





## **LAMPIRAN 2**

data variabel keseluruhan (a+b+c)

	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9
1	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
2	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
3	1.00	1.00	3.00	5.00	2.00	3.00	3.00
4	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
5	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	3.00
6	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00
7	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
8	1.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00
9	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
10	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00
11	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
12	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
13	1.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00
14	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
15	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00
16	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
17	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00
18	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00
19	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00
20	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
21	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00
22	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00
23	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
24	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00
25	1.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
26	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00
27	1.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00
28	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
29	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00
30	1.00	1.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00
31	3.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00
32	1.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00
33	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00
34	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00
35	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00

data variabel keseluruhan (a+b+c)

	a10	a11	a12	a13	a14	a15	a16
1	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
2	3.00	2.00	5.00	3.00	3.00	4.00	5.00
3	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00
4	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	5.00
5	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
6	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00
7	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
8	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
9	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	3.00
10	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
11	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00
12	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
13	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00
14	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00
15	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00
16	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00
17	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00
18	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
19	4.00	4.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00
20	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
21	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
22	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
23	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
24	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
25	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00
26	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00
27	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
28	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00
29	3.00	2.00	5.00	3.00	3.00	4.00	5.00
30	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00
31	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
32	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00
33	4.00	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00
34	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
35	4.00	4.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00

data variabel keseluruhan (a+b+c)

	a17	a18	a19	a20	a21	a22	a23
1	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	4.00
3	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
4	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00
5	3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00
6	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
7	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	4.00
8	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00
9	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00
10	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00
11	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00
12	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
13	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00
14	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00
15	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00
16	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00
17	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
18	2.00	3.00	2.00	4.00	3.00	5.00	5.00
19	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00
20	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00
21	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	5.00	4.00
22	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00
23	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00
24	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00
25	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	3.00
26	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	4.00
27	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00
28	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00
29	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	5.00	4.00
30	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	5.00
31	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	5.00
32	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00
33	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00
34	2.00	3.00	2.00	4.00	3.00	4.00	5.00
35	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00

data variabel keseluruhan (a+b+c)

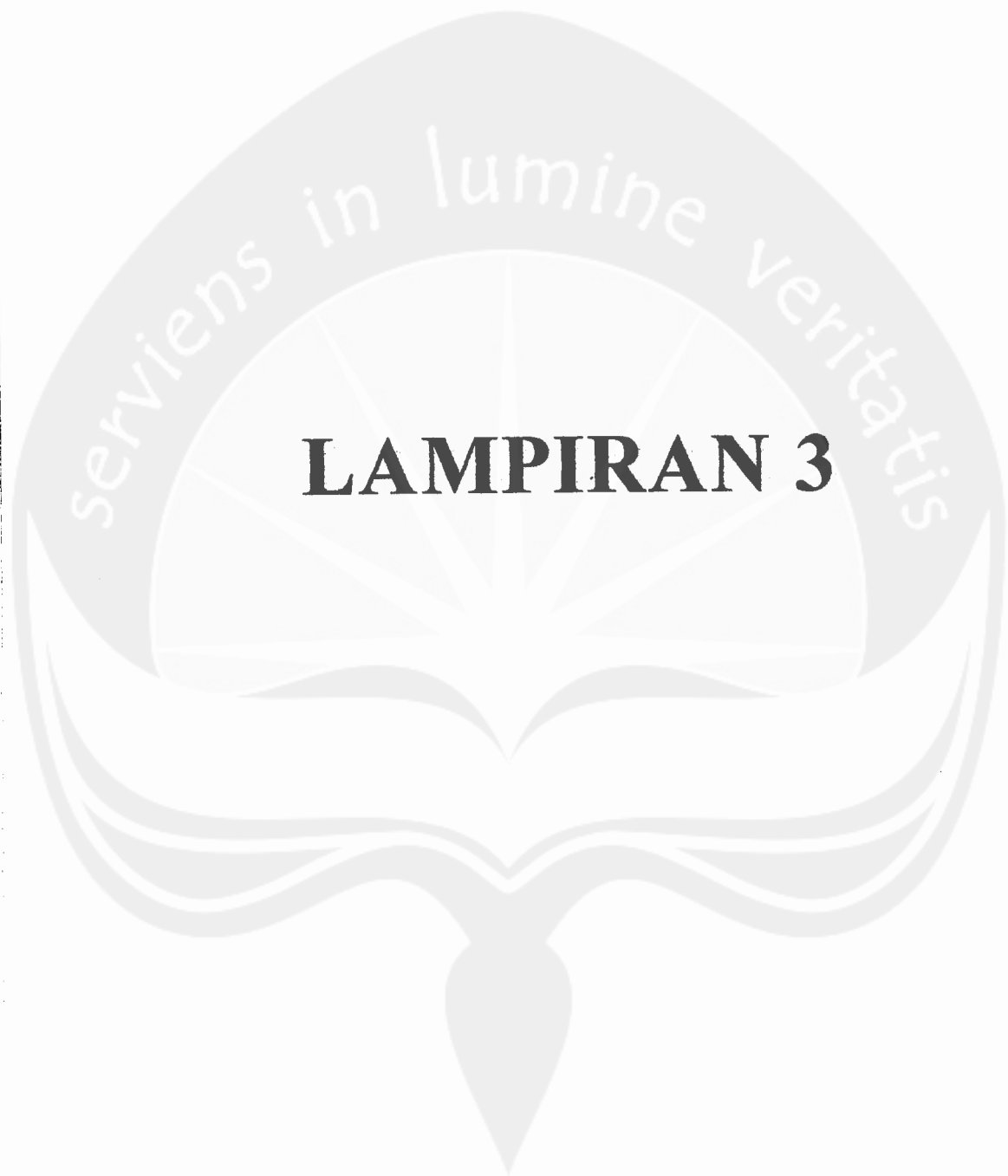
	atotal	b24	b25	b26	b27	b28	b29
1	76.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00
2	68.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
3	60.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
4	60.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
5	72.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
6	81.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00
7	70.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
8	66.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00
9	67.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
10	70.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
11	57.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
12	70.00	4.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00
13	54.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
14	67.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
15	83.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
16	59.00	4.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00
17	41.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00
18	80.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
19	54.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
20	78.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
21	85.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
22	66.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
23	71.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
24	88.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
25	53.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
26	69.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
27	66.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	3.00
28	67.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
29	68.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
30	60.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
31	84.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
32	54.00	3.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00
33	66.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
34	80.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
35	52.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00

data variabel keseluruhan (a+b+c)

	b30	b31	b32	btotal	c33	c34	c35
1	2.00	3.00	3.00	30.00	4.00	4.00	4.00
2	2.00	4.00	4.00	31.00	4.00	5.00	5.00
3	3.00	2.00	2.00	25.00	2.00	4.00	4.00
4	4.00	4.00	4.00	34.00	5.00	5.00	4.00
5	4.00	4.00	4.00	34.00	4.00	4.00	4.00
6	3.00	4.00	4.00	34.00	5.00	4.00	4.00
7	4.00	4.00	4.00	36.00	4.00	5.00	4.00
8	3.00	3.00	3.00	27.00	4.00	3.00	4.00
9	3.00	4.00	4.00	32.00	4.00	4.00	4.00
10	2.00	3.00	4.00	30.00	4.00	4.00	4.00
11	2.00	3.00	3.00	27.00	4.00	4.00	4.00
12	2.00	4.00	4.00	29.00	2.00	5.00	4.00
13	2.00	2.00	2.00	22.00	4.00	4.00	4.00
14	4.00	4.00	4.00	36.00	3.00	3.00	4.00
15	4.00	4.00	4.00	38.00	4.00	5.00	4.00
16	4.00	2.00	2.00	25.00	4.00	4.00	2.00
17	2.00	4.00	2.00	24.00	4.00	4.00	2.00
18	3.00	4.00	4.00	35.00	4.00	5.00	4.00
19	2.00	2.00	2.00	21.00	3.00	3.00	4.00
20	4.00	4.00	4.00	36.00	4.00	5.00	5.00
21	4.00	4.00	4.00	38.00	4.00	5.00	5.00
22	4.00	3.00	4.00	32.00	4.00	4.00	4.00
23	4.00	3.00	3.00	31.00	4.00	4.00	3.00
24	5.00	4.00	4.00	39.00	5.00	5.00	5.00
25	2.00	2.00	3.00	26.00	4.00	2.00	4.00
26	4.00	4.00	4.00	36.00	4.00	5.00	4.00
27	2.00	3.00	4.00	30.00	3.00	3.00	4.00
28	3.00	4.00	4.00	32.00	4.00	4.00	4.00
29	2.00	4.00	4.00	33.00	5.00	5.00	5.00
30	3.00	2.00	2.00	27.00	4.00	4.00	4.00
31	5.00	4.00	4.00	39.00	4.00	5.00	5.00
32	2.00	2.00	2.00	23.00	4.00	4.00	4.00
33	4.00	2.00	4.00	33.00	3.00	3.00	2.00
34	3.00	4.00	4.00	35.00	4.00	5.00	4.00
35	2.00	2.00	2.00	21.00	3.00	3.00	4.00

data variabel keseluruhan (a+b+c)

	c36	c37	c38	c39	c40	c41	ctotal
1	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00	3.00	34.00
2	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	1.00	31.00
3	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	27.00
4	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	37.00
5	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	33.00
6	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	2.00	35.00
7	4.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	31.00
8	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	26.00
9	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	1.00	30.00
10	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	1.00	31.00
11	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	1.00	27.00
12	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	3.00	32.00
13	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	25.00
14	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	2.00	29.00
15	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	5.00	37.00
16	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	26.00
17	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00	23.00
18	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00	37.00
19	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	22.00
20	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	37.00
21	4.00	4.00	3.00	5.00	5.00	3.00	38.00
22	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	32.00
23	4.00	4.00	2.00	3.00	4.00	2.00	30.00
24	5.00	4.00	3.00	5.00	5.00	3.00	40.00
25	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	1.00	24.00
26	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	30.00
27	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	26.00
28	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	1.00	29.00
29	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	1.00	32.00
30	5.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	29.00
31	5.00	4.00	3.00	5.00	5.00	3.00	39.00
32	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	25.00
33	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00	2.00	26.00
34	4.00	3.00	4.00	4.00	5.00	3.00	36.00
35	2.00	1.00	2.00	3.00	4.00	2.00	24.00



**LAMPIRAN 3**



# VALIDITAS

## 1. Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A)

**Correlations**

		A3	TOTAL
A3	Pearson Correlation	1	.773**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.773**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A4	TOTAL
A4	Pearson Correlation	1	.669**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.669**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A5	TOTAL
A5	Pearson Correlation	1	.634**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.634**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A6	TOTAL
A6	Pearson Correlation	1	.573**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.573**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A7	TOTAL
A7	Pearson Correlation	1	.345*
	Sig. (2-tailed)	.	.010
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.345*	1
	Sig. (2-tailed)	.010	.
	N	35	35

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlations**

		A8	TOTAL
A8	Pearson Correlation	1	.429*
	Sig. (2-tailed)	.	.010
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.429*	1
	Sig. (2-tailed)	.010	.
	N	35	35

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlations**

		A9	TOTAL
A9	Pearson Correlation	1	.653**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.653**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A10	TOTAL
A10	Pearson Correlation	1	.498**
	Sig. (2-tailed)	.	.002
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.498**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A11	TOTAL
A11	Pearson Correlation	1	.459**
	Sig. (2-tailed)	.	.006
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.459**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A12	TOTAL
A12	Pearson Correlation	1	.657**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.657**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A13	TOTAL
A13	Pearson Correlation	1	.566**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.566**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A14	TOTAL
A14	Pearson Correlation	1	.712**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.712**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A15	TOTAL
A15	Pearson Correlation	1	.730**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.730**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A16	TOTAL
A16	Pearson Correlation	1	.586**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.586**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A17	TOTAL
A17	Pearson Correlation	1	.697**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.697**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A18	TOTAL
A18	Pearson Correlation	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A19	TOTAL
A19	Pearson Correlation	1	.561**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.561**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A20	TOTAL
A20	Pearson Correlation	1	.718**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.718**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A21	TOTAL
A21	Pearson Correlation	1	.659**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.659**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A22	TOTAL
A22	Pearson Correlation	1	.715**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.715**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		A23	TOTAL
A23	Pearson Correlation	1	.645**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.645**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

## 2. Variabel Persepsi (B)

**Correlations**

		B24	TOTAL
B24	Pearson Correlation	1	.669**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.669**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		B25	TOTAL
B25	Pearson Correlation	1	.900**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.900**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		B26	TOTAL
B26	Pearson Correlation	1	.844**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.844**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		B27	TOTAL
B27	Pearson Correlation	1	.624**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.624**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		B28	TOTAL
B28	Pearson Correlation	1	.604**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.604**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		B29	TOTAL
B29	Pearson Correlation	1	.705**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.705**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		B30	TOTAL
B30	Pearson Correlation	1	.714**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.714**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level



**Correlations**

		B31	TOTAL
B31	Pearson Correlation	1	.774**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		B32	TOTAL
B32	Pearson Correlation	1	.868**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.868**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

### 3. Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI ©

**Correlations**

		C33	TOTAL
C33	Pearson Correlation	1	.441**
	Sig. (2-tailed)	.	.008
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.441**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		C34	TOTAL
C34	Pearson Correlation	1	.749**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.749**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		C35	TOTAL
C35	Pearson Correlation	1	.532**
	Sig. (2-tailed)	.	.001
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.532**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		C36	TOTAL
C36	Pearson Correlation	1	.714**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.714**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		C37	TOTAL
C37	Pearson Correlation	1	.806**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.806**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		C38	TOTAL
C38	Pearson Correlation	1	.755**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.755**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

**Correlations**

		C39	TOTAL
C39	Pearson Correlation	1	.591**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.591**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level

### Correlations

		C40	TOTAL
C40	Pearson Correlation	1	.552**
	Sig. (2-tailed)	.	.001
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.552**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level

### Correlations

		C41	TOTAL
C41	Pearson Correlation	1	.668**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
TOTAL	Pearson Correlation	.668**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level



**LAMPIRAN 4**

# UJI RELIABILITAS

## 1. Uji Reliabilitas Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A)

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

1. A3
2. A4
3. A5
4. A6
5. A7
6. A8
7. A9
8. A10
9. A11
10. A12
11. A13
12. A14
13. A15
14. A16
15. A17
16. A18
17. A19
18. A20
19. A21
20. A22
21. A23
22. TOTAL

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	135.4286	467.4286	21.6201	22

### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

#### Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
A3	133.2571	436.3731	.7560	.7330
A4	133.0286	442.0286	.6392	.7369

A5	132.0571	447.1143	.6054	.7399
A6	131.2857	452.9160	.5531	.7433
A7	131.7429	460.7849	.2305	.7486
A8	131.6286	457.5933	.4202	.7463
A9	132.3714	443.4168	.6327	.7377
A10	131.7429	454.8437	.4927	.7446
A11	132.4000	450.1294	.4555	.7423
A12	131.7714	438.5933	.6658	.7348
A13	132.0571	454.5849	.5379	.7443
A14	132.0000	442.2941	.7140	.7367
A15	132.2857	432.3866	.7287	.7309
A16	132.0857	440.0218	.5937	.7361
A17	133.1714	446.9109	.6761	.7395
A18	132.9143	445.0218	.6977	.7383
A19	133.0286	450.3815	.5619	.7419
A20	132.0571	447.0555	.7310	.7394
A21	132.2857	441.2689	.6610	.7363
A22	131.4000	437.7176	.7211	.7340
A23	131.4857	440.9630	.6498	.7362
TOTAL	67.9429	118.8202	.9692	.9254

#### Reliability Coefficients

N of Cases = 35.0

N of Items = 22

Alpha = .7503

## 2. Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Wartawan Terhadap Humas DPR RI (B)

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

1. B24
2. B25
3. B26
4. B27
5. B28
6. B29
7. B30
8. B31
9. B32
10. TOTAL

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of
SCALE	61.7714	110.7697	10.5247	Variables
				10

#### Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
B24	58.0571	100.7613	.6270	.7602
B25	58.2571	93.6672	.8801	.7366
B26	58.4571	97.2555	.8204	.7478
B27	58.0000	103.8824	.5909	.7683
B28	58.3429	103.4084	.5653	.7674
B29	58.4000	102.2471	.6748	.7632
B30	58.6857	96.9866	.6633	.7506
B31	58.4857	97.4924	.7383	.7500
B32	58.3714	96.0050	.8462	.7439
TOTAL	30.8857	27.6924	1.0000	.8996

#### Reliability Coefficients

N of Cases = 35.0

N of Items = 10

Alpha = .7777



### 3. Uji Reliabilitas Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI ©

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

#### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

1. C33
2. C34
3. C35
4. C36
5. C37
6. C38
7. C39
8. C40
9. C41
10. TOTAL

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	61.1429	100.0672	10.0034	10

#### Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
C33	57.2857	94.4454	.3823	.7537
C34	57.0000	88.5882	.7102	.7314
C35	57.1714	92.6756	.4751	.7476
C36	57.6286	86.6521	.6585	.7274
C37	58.1429	84.9496	.7659	.7191
C38	58.4571	89.7261	.7220	.7346
C39	57.8286	89.9109	.5254	.7398
C40	57.2000	92.5765	.4990	.7468
C41	59.0000	87.6471	.6069	.7317
TOTAL	30.5714	25.0168	1.0000	.8267

#### Reliability Coefficients

N of Cases = 35.0

N of Items = 10

Alpha = .7597



## **LAMPIRAN 5**

# DISTRIBUSI FREKUENSI

**Jenis Media Responden**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid majalah	7	20.0	20.0	20.0
media online	1	2.9	2.9	22.9
radio	5	14.3	14.3	37.1
surat kabar	15	42.9	42.9	80.0
tabloid	1	2.9	2.9	82.9
televisi	6	17.1	17.1	100.0
Total	35	100.0	100.0	

## 1. Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A)

A3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	8	22.9	22.9	22.9
2.00	18	51.4	51.4	74.3
3.00	4	11.4	11.4	85.7
4.00	5	14.3	14.3	100.0
Total	35	100.0	100.0	

A4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	4	11.4	11.4	11.4
2.00	19	54.3	54.3	65.7
3.00	6	17.1	17.1	82.9
4.00	6	17.1	17.1	100.0
Total	35	100.0	100.0	

**A5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	14.3	14.3	14.3
	3.00	13	37.1	37.1	51.4
	4.00	16	45.7	45.7	97.1
	5.00	1	2.9	2.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.9	2.9	2.9
	3.00	1	2.9	2.9	5.7
	4.00	25	71.4	71.4	77.1
	5.00	8	22.9	22.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	5.7	5.7	5.7
	3.00	8	22.9	22.9	28.6
	4.00	24	68.6	68.6	97.1
	5.00	1	2.9	2.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.9	2.9	2.9
	3.00	6	17.1	17.1	20.0
	4.00	27	77.1	77.1	97.1
	5.00	1	2.9	2.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	10	28.6	28.6	28.6
	3.00	15	42.9	42.9	71.4
	4.00	8	22.9	22.9	94.3
	5.00	2	5.7	5.7	100.0
Total		35	100.0	100.0	

**A10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	5.7	5.7	5.7
	3.00	7	20.0	20.0	25.7
	4.00	26	74.3	74.3	100.0
Total		35	100.0	100.0	

**A11**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	12	34.3	34.3	34.3
	3.00	10	28.6	28.6	62.9
	4.00	13	37.1	37.1	100.0
Total		35	100.0	100.0	

**A12**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	22.9	22.9	22.9
	3.00	1	2.9	2.9	25.7
	4.00	21	60.0	60.0	85.7
	5.00	5	14.3	14.3	100.0
Total		35	100.0	100.0	

**A13**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.9	2.9	2.9
	3.00	20	57.1	57.1	60.0
	4.00	14	40.0	40.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A14**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	20.0	20.0	20.0
	3.00	6	17.1	17.1	37.1
	4.00	22	62.9	62.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A15**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	11.4	11.4	11.4
	2.00	7	20.0	20.0	31.4
	3.00	4	11.4	11.4	42.9
	4.00	20	57.1	57.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A16**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	11	31.4	31.4	31.4
	3.00	5	14.3	14.3	45.7
	4.00	15	42.9	42.9	88.6
	5.00	4	11.4	11.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A17**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	5.7	5.7	5.7
	2.00	25	71.4	71.4	77.1
	3.00	5	14.3	14.3	91.4
	4.00	3	8.6	8.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A18**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.9	2.9	2.9
	2.00	19	54.3	54.3	57.1
	3.00	11	31.4	31.4	88.6
	4.00	4	11.4	11.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A19**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.9	2.9	2.9
	2.00	22	62.9	62.9	65.7
	3.00	9	25.7	25.7	91.4
	4.00	3	8.6	8.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A20**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	8.6	8.6	8.6
	3.00	16	45.7	45.7	54.3
	4.00	16	45.7	45.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A21**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	11	31.4	31.4	31.4
	3.00	9	25.7	25.7	57.1
	4.00	14	40.0	40.0	97.1
	5.00	1	2.9	2.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A22**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.9	2.9	2.9
	2.00	2	5.7	5.7	8.6
	3.00	3	8.6	8.6	17.1
	4.00	18	51.4	51.4	68.6
	5.00	11	31.4	31.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**A23**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	5.7	5.7	5.7
	3.00	4	11.4	11.4	17.1
	4.00	21	60.0	60.0	77.1
	5.00	8	22.9	22.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	



## 2. Variabel Persepsi Wartawan Terhadap Hums DPR RI (B)

**B24**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	5.7	5.7	5.7
	3.00	10	28.6	28.6	34.3
	4.00	19	54.3	54.3	88.6
	5.00	4	11.4	11.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**B25**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	20.0	20.0	20.0
	3.00	7	20.0	20.0	40.0
	4.00	17	48.6	48.6	88.6
	5.00	4	11.4	11.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**B26**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	20.0	20.0	20.0
	3.00	10	28.6	28.6	48.6
	4.00	18	51.4	51.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**B27**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	5.7	5.7	5.7
	3.00	4	11.4	11.4	17.1
	4.00	29	82.9	82.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**B28**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	5.7	5.7	5.7
	3.00	16	45.7	45.7	51.4
	4.00	17	48.6	48.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**B29**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	5.7	5.7	5.7
	3.00	18	51.4	51.4	57.1
	4.00	15	42.9	42.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**B30**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	13	37.1	37.1	37.1
	3.00	8	22.9	22.9	60.0
	4.00	12	34.3	34.3	94.3
	5.00	2	5.7	5.7	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**B31**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	9	25.7	25.7	25.7
	3.00	7	20.0	20.0	45.7
	4.00	19	54.3	54.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**B32**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	22.9	22.9	22.9
	3.00	5	14.3	14.3	37.1
	4.00	22	62.9	62.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

### 3. Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI ©

**C33**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	5.7	5.7	5.7
	3.00	5	14.3	14.3	20.0
	4.00	24	68.6	68.6	88.6
	5.00	4	11.4	11.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**C34**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.9	2.9	2.9
	3.00	6	17.1	17.1	20.0
	4.00	15	42.9	42.9	62.9
	5.00	13	37.1	37.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**C35**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	8.6	8.6	8.6
	3.00	1	2.9	2.9	11.4
	4.00	25	71.4	71.4	82.9
	5.00	6	17.1	17.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**C36**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	22.9	22.9	22.9
	3.00	6	17.1	17.1	40.0
	4.00	16	45.7	45.7	85.7
	5.00	5	14.3	14.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**C37**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	5.7	5.7	5.7
	2.00	11	31.4	31.4	37.1
	3.00	7	20.0	20.0	57.1
	4.00	15	42.9	42.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**C38**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	2.9	2.9	2.9
	2.00	13	37.1	37.1	40.0
	3.00	17	48.6	48.6	88.6
	4.00	4	11.4	11.4	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**C39**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	22.9	22.9	22.9
	3.00	11	31.4	31.4	54.3
	4.00	13	37.1	37.1	91.4
	5.00	3	8.6	8.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**C40**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.9	2.9	2.9
	3.00	7	20.0	20.0	22.9
	4.00	20	57.1	57.1	80.0
	5.00	7	20.0	20.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**C41**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	10	28.6	28.6	28.6
	2.00	14	40.0	40.0	68.6
	3.00	8	22.9	22.9	91.4
	4.00	2	5.7	5.7	97.1
	5.00	1	2.9	2.9	100.0
	Total	35	100.0	100.0	



**LAMPIRAN 6**

## KOEFSISIEN KORELASI ®

### 1. Uji Koefisien Korelasi Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A) – Variabel Persepsi Wartawan Terhadap Humas DPR RI (B)

**Correlations**

		Prinsip-prinsip Hubungan Media	Persepsi
Prinsip-prinsip Hubungan Media	Pearson Correlation	1	.853**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
Persepsi	Pearson Correlation	.853**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 2. Uji Koefisien Korelasi Variabel Persepsi Wartawan Terhadap Humas DPR RI (B) – Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI (C)

**Correlations**

		Persepsi	Sikap Wartawan Terhadap Organisasi
Persepsi	Pearson Correlation	1	.851**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
Sikap Wartawan Terhadap Organisasi	Pearson Correlation	.851**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**3. Uji Koefisien Korelasi Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A) – Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI (C)**

**Correlations**

		Prinsip-prinsip Hubungan Media	Sikap Wartawan Terhadap Organisasi
Prinsip-prinsip Hubungan Media	Pearson Correlation	1	.882**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	35	35
Sikap Wartawan Terhadap Organisasi	Pearson Correlation	.882**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



**LAMPIRAN 7**



## **KOEFISIEN DETERMINASI (R square / R<sup>2</sup>)**

### **1. Koefisien Determinasi Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A) – Variabel Persepsi Wartawan Terhadap Humas DPR RI (B)**

R square = R<sup>2</sup> Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A) – Variabel Persepsi (B)

R square = 0.853<sup>2</sup>

R square = 0.727609

R square = 72.7 %

### **2. Koefisien Determinasi Variabel Persepsi Wartawan Terhadap Humas DPR RI (B) – Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI (C)**

R square = R<sup>2</sup> Variabel Persepsi (B)–Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI (C)

R square = 0.851<sup>2</sup>

R square = 0.724201

R square = 72.4 %

### **3. Koefisien Determinasi Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A) – Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI (C)**

R square = R<sup>2</sup> Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A) – Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI (C)

R square = 0.882<sup>2</sup>

R square = 0.777924

R square = 77.7 %



**LAMPIRAN 8**

# HASIL REGRESI SEDERHANA

## 1. Hasil Regresi Sederhana Antara Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A) – Variabel Persepsi Wartawan Terhadap Humas DPR RI (B)

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Persepsi	30.8857	5.26236	35
Prinsip-Prinsip Hubungan Media	67.4857	10.88812	35

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Prinsip-Prinsip Hubungan Media		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Persepsi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.853 <sup>a</sup>	.727	.719	2.79133	.727	87.842	1	33	.000	2.427

a. Predictors: (Constant), Prinsip-Prinsip Hubungan Media

b. Dependent Variable: Persepsi

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	684.423	1	684.423	87.842	.000 <sup>a</sup>
	Residual	257.120	33	7.792		
	Total	941.543	34			

a. Predictors: (Constant), Prinsip-Prinsip Hubungan Media

b. Dependent Variable: Persepsi

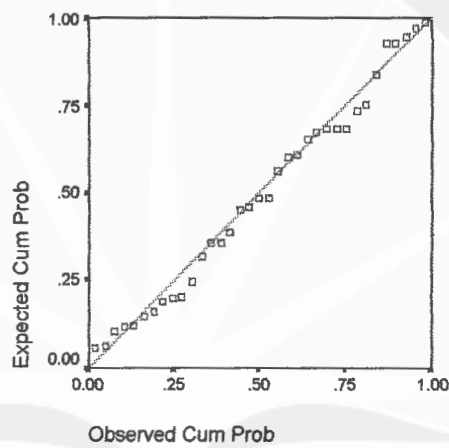
**Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.077	3.004		1.024	.313					
	Prinsip-Prinsip Hubungan M	.412	.044	.853	9.372	.000	.853	.853	.853	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Persepsi

**Normal P-P Plot of Regression Stand**

Dependent Variable: Persepsi



**2. Hasil Regresi Sederhana antara Variabel Persepsi Wartawan Terhadap Humas DPR RI (B) dengan Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI (C)**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI	30.5714	5.00168	35
Persepsi	30.8857	5.26236	35

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Persepsi <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.851 <sup>a</sup>	.724	.715	2.66875	.724	86.425	1	33	.000	1.839

a. Predictors: (Constant), Persepsi

b. Dependent Variable: Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	615.539	1	615.539	86.425	.000 <sup>a</sup>
	Residual	235.033	33	7.122		
	Total	850.571	34			

a. Predictors: (Constant), Persepsi

b. Dependent Variable: Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI

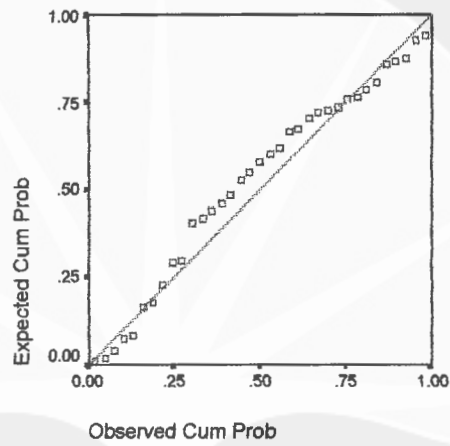
**Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.599	2.724		2.055	.048					
	Persepsi	.809	.087	.851	9.297	.000	.851	.851	.851	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI

**Normal P-P Plot of Regression Standard**

Dependent Variable: Sikap Wartawan



**3. Hasil Regresi Sederhana antara Variabel Prinsip-Prinsip Hubungan Media (A) dengan Variabel Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI (C)**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI	30.5714	5.00168	35
Prinsip-Prinsip Hubungan Media	67.4857	10.88812	35

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Prinsip-Prinsip Hubungan Media		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					Change	F Change	df1	df2	sig. F Change	
1	.882 <sup>a</sup>	.777	.770	2.39673	.777	115.072	1	33	.000	1.994

a. Predictors: (Constant), Prinsip-Prinsip Hubungan Media

b. Dependent Variable: Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	661.009	1	661.009	115.072	.000 <sup>a</sup>
	Residual	189.563	33	5.744		
	Total	850.571	34			

a. Predictors: (Constant), Prinsip-Prinsip Hubungan Media

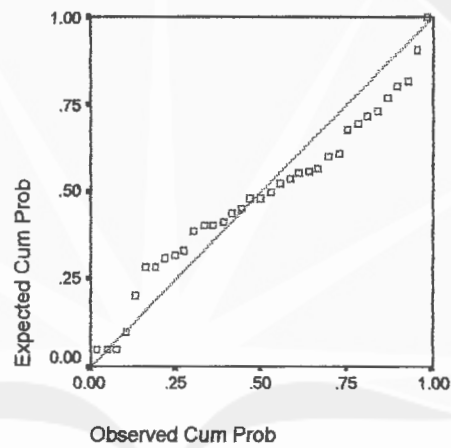
b. Dependent Variable: Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI

**Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.242	2.580		1.257	.218					
	Prinsip-Prinsip Hubungan M	.405	.038	.882	10.727	.000	.882	.882	.882	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Sikap Wartawan Terhadap Humas DPR RI

Normal P-P Plot of Regression Standard  
Dependent Variable: Sikap Wartawar







**LAMPIRAN 9**

Tabel Ukuran Sampel Untuk Tingkat Kepercayaan dan Presisi

Tertentu Jika Menyampel Atribut Dalam Persen\*

Selang Kepercayaan 95% ( $p = 0,5$ )<sup>a</sup>

Uk. populasi	± 1%	± 2%	± 3%	± 4%	± 5%	± 10%
500	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	222	83
1,000	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	385	286	91
1,500	<i>b</i>	<i>b</i>	638	441	316	94
2,000	<i>b</i>	<i>b</i>	714	476	333	95
2,500	<i>b</i>	1,250	769	500	345	96
3,000	<i>b</i>	1,364	811	517	353	97
3,500	<i>b</i>	1,458	843	530	359	97
4,000	<i>b</i>	1,538	870	541	364	98
4,500	<i>b</i>	1,607	891	549	367	98
5,000	<i>b</i>	1,667	909	556	370	98
6,000	<i>b</i>	1,765	938	566	375	98
7,000	<i>b</i>	1,842	959	574	378	99
8,000	<i>b</i>	1,905	976	580	381	99
9,000	<i>b</i>	1,957	989	584	383	99
10,000	5,000	2,000	1,000	588	385	99
15,000	6,000	2,143	1,034	600	390	99
20,000	6,667	2,222	1,053	606	392	100
25,000	7,143	2,273	1,064	610	394	100
50,000	8,333	2,381	1,087	617	397	100
100,000	9,091	2,439	1,099	621	398	100
→∞	10,000	2,500	1,111	625	400	100

**Harga Kritik dari r Product Moment**

N	Tarf Signifikansi		N	Tarf Signifikansi	
	5 %	10 %		5%	10%
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3	0.997	0.999	39	0.316	0.408
4	0.950	0.990	40	0.312	0.403
5	0.878	0.959	41	0.308	0.398
6	0.811	0.917	42	0.304	0.393
7	0.754	0.874	43	0.301	0.389
8	0.707	0.874	44	0.297	0.384
9	0.666	0.798	45	0.294	0.380
10	0.632	0.765	46	0.291	0.376
11	0.602	0.735	47	0.288	0.372
12	0.576	0.708	48	0.284	0.368
13	0.553	0.684	49	0.281	0.364
14	0.532	0.661	50	0.279	0.361
15	0.514	0.641	55	0.266	0.345
16	0.497	0.623	60	0.254	0.330
17	0.482	0.606	65	0.244	0.317
18	0.468	0.590	70	0.235	0.306
19	0.456	0.575	75	0.227	0.296
20	0.444	0.561	80	0.220	0.286
21	0.433	0.549	85	0.213	0.278
22	0.423	0.537	90	0.207	0.270
23	0.413	0.526	95	0.202	0.263
24	0.404	0.515	100	0.195	0.256
25	0.396	0.505	125	0.176	0.230
26	0.388	0.496	150	0.159	0.210
27	0.381	0.487	175	0.148	0.194
28	0.374	0.478	200	0.138	0.181
29	0.367	0.470	300	0.113	0.148
30	0.361	0.463	400	0.098	0.128
31	0.355	0.456	500	0.088	0.115
32	0.349	0.449	600	0.080	0.105
33	0.344	0.442	700	0.074	0.097
34	0.339	0.436	800	0.070	0.091
35	0.334	0.430	900	0.065	0.086
36	0.329	0.424	1000	0.062	0.081
37	0.325	0.418			
38	0.320	0.413			

(Sumber: Hadi, 1995 : 360)

## Lampiran C

Titik Kritis  
Uji F,  $\alpha=5\%$



$df_1=3, df_2=10, F=4,10$

		$V_1=$ Degree of Freedom Numerator								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
$V_2=$ Degree of Freedom Denominator	1	161	200	216	225	230	234	237	239	241
	2	18,50	19,00	19,20	19,20	19,30	19,30	19,40	19,40	19,40
	3	10,10	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,88	8,85	8,81
	4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00
	5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77
	6	5,59	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10
	7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68
	8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39
	9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18
	10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02
	11	4,84	3,99	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90
	12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80
	13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71
	14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65
	15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59
	16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54
	17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49
	18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46
	19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42
	20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39
	21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37
	22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34
	23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32
	24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30
	25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	
	3,84	3	2,6	2,37	2,21	2,1	2,01	1,94	1,88	



**LAMPIRAN 10**



**STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO HUMAS DAN HUKUM SETJEN DPR RI**

**BIRO HUMAS DAN HUKUM**  
Drs. Riado Simandjuntak

**BAGIAN HUMAS**  
Drs. ~~Sudarmo~~ ~~Purpano~~  
Suroso Sudarsono

Sub Bag Pengaturan  
Delegasi Masyarakat

Sub Bag Penerangan

**BAGIAN PEMBERITAAN DAN PENERBITAN**  
Drs. ~~Tri-Budi Utami~~  
Drs. Helmi Zor

Sub Bag Pemberitaan dan  
Media Visual

Sub Bag Penerbitan

Sub Bag Dok dan Adim  
Perjalanan Luar Negeri

**BAGIAN PROTOKOL**  
Suryadi Hadi Saputro

Sub Bag Tamu

Sub Bag Upacara

**BAGIAN HUKUM**  
~~Rusniatmingsih, SH~~  
Khaerahudin, SH, MCI

Sub Bag Adm POU

Sub Bag Pertimbangan  
dan Bantuan Hukum

## **RANCANGAN UNDANG-UNDANG tentang PRAKTIK KEDOKTERAN DISETUJUI UNTUK DIBAWA KETINGKAT PARIPURNA**

Rancangan Undang-Undang Praktik Kedokteran Rabu (25/8) disetujui sembilan fraksi di Komisi VII DPR RI untuk dilanjutkan dalam Pembahasan Tingkat II (Rapat Paripurna Dewan) agar disahkan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Persetujuan tersebut terungkap saat Pemandangan Akhir Mini (PAM) fraksi-fraksi di Komisi VII, yang dipimpin Ketua Komisi Iping Somantri.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi PDIP Gunawan Slamet mengatakan, latar belakang dibuatnya RUU PK karena adanya ketidak seimbangan antara dokter sebagai pelayan jasa medis dan pasien sebagai penerima jasa medis.

Lebih lanjut Gunawan mengatakan sejak dulu timbul persepsi, dokter sebagai pelayan jasa medis selalu lebih tinggi atau lebih kuat/superior dari pada pasien. Pasien sebagai penerima jasa medis menjadi lebih inferior. Dengan UU PK ini diharapkan lebih menjamin kedudukan dokter dan pasien menjadi seimbang mencakup masalah hak dan kewajiban.

Hal senada juga disampaikan Jubir Fraksi Kebangkitan Bangsa Ahmad Sayuti, FKB berharap dengan RUU PK ini dapat membangun system perlindungan yang maksimal, sehingga memungkinkan para pelaksana untuk melaksanakan profesinya secara professional, dan para pengguna pelayanan kesehatan terhindar dari perlakuan/tindakan yang kurang tepat dari pelaksana pelayanan kesehatan.

Tgk. Baihaqi yang ditunjuk sebagai Jubir F-PPP, mengatakan RUU PK ini untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi sebagai jawaban tuntutan masyarakat.

Sementara itu Lapoe Moekoe yang menjadi Jubir Fraksi Partai Golkar menyampaikan harapan dan saran kepada pemerintah agar keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai sebuah badan otonom, mandiri, nonstructural dan bersifat independen, yang terdiri dari konsil Kedokteran dan Konsil kedokteran Gigi sebagai syarat yang sangat dibutuhkan dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan UU tentang Parktek Kedokteran.

### **Tidak Berpihak ke Pasien**

Dalam RUU PK nyaris tak berarti banyak dalam melindungi kepentingan masyarakat karena tak mengatur sanksi bagi dokter maupun dokter gigi yang melakukan kelalaian saat menangani pasien. Bahkan majelis



kehormatan yang berwenang menangani pasien dengan pemberi jasa layanan kesehatan juga hanya bertindak bila ada laporan.

Seklipun demikian, seluruh fraksi dalam Komisi VII DPR dan Menteri Kesehatan Akhmad Sujudi menyambut gembira kelahiran UU tersebut. “ Ini Kemajuan, karena dari belum ada sekarang punya UU sendiri.” Tuturnya.

Wakil Ketua Komisi VII Surya Chandra Surapaty menyatakan, setiap orang yang kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi bisa melaporkan kasusnya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Pada saat yang bersamaan, mereka juga bisa mengadukan kasusnya tersebut ke pihak yang berwenang atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

“ Adalah hak setiap orang jika mereka tidak melaporkan kasusnya ke majelis ini. Hak mereka juga untuk mengadukan ke aparat keamanan, ke pengadilan pidana atau pengadilan perdata,” kata Surya Chandra.

Namun ketentuan pidana yang tercantum dalam UU itu hanya mengatur masalah administrative seperti dokter WNI maupun WNA yang berpraktek tanpa regristrasi, tanpa izin praktik, tanpa papan nama, sampai sengaja tak membuat rekam medis. (rif)

## RUU ANTI-KDRT DIBAHAS KOMISI VII DPR RI

Setelah menunggu sekitar enam tahun, akhirnya Panitia Khusus Komisi VII DPR RI bersama menteri pemberdayaan perempuan Sri Redjeki Sumaryoto membahas Rancangan Undang\_undang Anti-Kekerasan dalam Rumah Tangga (RUU Anti-KDRT). Pihak pemerintah dan DPR sepakat, RUU tersebut akan dibahas secara maraton dengan target 8 September naskah akhir sudah ditandatangani.

Pada pembahasan hari ke dua, Selasa (24/8), sempat terjadi perbedaan pendapat di antara anggota Pansus Komisi VII mengenai bahan pertimbangan adanya sebuah UU yang melindungi warga negara dari segala bentuk kekerasan.

Menurut versi DPR, pertimbangan kedua dibuatnya RUU- disepakati bernama Penghapusan KDRT adalah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, yang harus dihapus sesuai Konvensi Internasional maupun Deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Mariani AB, Fraksi Partai Golkar menjelaskan, salah satu sebab muncul pertimbangan itu karena hukum Indonesia belum memiliki peraturan menyangkut KDRT. KUHP maupun KUHAP juga belum menampung seluruh KDRT. Maka masih perlu mencantumkan konvensi internasional yang mendesak penghapusan kekerasan tersebut.

Pencantuman Konvensi Internasional maupun Deklarasi PBB dinilai beberapa anggota Pansus seperti Bondan Gunawan (F-PBB), Mustopo (F-TNI/POLRI) sebagai tak perlu. Pasalnya, perlindungan kepada perempuan terutama yang terikat perkawinan sudah diatur dalam hukum adat, budaya dan semua agama di Indonesia.

“ Untuk apa ikut budaya barat. Kita sudah punya hukum sendiri yang melindungi perempuan. Ada hukum adat ada hukum Islam. Kalau saya pukul isteri saya lalu ia melapor ke orang lain, maka orang itu akan saya bunuh. Ini urusan intern dalam keluarga saya, untuk apa orang lain ikut urusan rumah tangga saya,” jelas Mustopo.

Akhirnya pertimbangan kedua (dim nomor 5b) memakai versi pemerintah yang menghilangkan kata-kata sesuai Konvensi Internasional dan Deklarasi PBB.

### **Krusial**

Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Redjeki menyatakan, pemerintah sangat serius menginginkan RUU tersebut segera diundangkan. Ia minta masyarakat dan pers mengikuti perkembangan pembahsan dan memberi masukan kepada pemerintah untuk penyempurnaannya.

Soal tidak dicantumkannya pasal mengenai kekerasan seksual (marital rape) dalam RUU versi pemerintah, Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi Kementerian PP Irma Alamsyah Djaya Putra, menjawab pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian. “Pemaksaan hubungan sek antara suami istri jika bisa dibuktikan bisa masuk dalam tindak pidana, tetapi itu sulit diintervensi orang lain,” tuturnya.

Sementara draf versi DPR pasal lima mengatur larangan tiap orang melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan sek, pemaksaan hubungan sek dengan cara tak wajar, dan atau tak disukai, pemaksaan hubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial, dan perusakan organ reproduksi perempuan.

### **Perlindungan Pada Korban KDRT**

Para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan mendapat perlindungan sementara serta pendampingan untuk memulihkan kondisinya. Sedang pelaku KDRT diusulkan dibatasi gerakannya untuk mencegah melakukan kekerasan lagi. Dalam pembahasan RUU ini belum diputuskan siapa ( instansi pemerintah atau lembaga sosial) yang akan memberikan perlindungan tersebut.

Pasal tentang pendampingan dan pembatasan gerak juga masih akan ditentukan setelah mendengar pendapat ahli hukum dalam rapar Panitia kerja (Panja) Komisi VII yang akan dimulai senin depan.

“ Perlindungan sementara bagi korban prinsipnya disetujui tapi kata-katanya akan dirumuskan lagi,” kata Ketua Pansus RUU Penghapusan KDRT Iping Somantri saat memimpin rapat.

Perlunya perlindungan dan pendampingan bagi korban serta pembatasan gerak bagi pelaku yang mengancam munculnya kekerasan diajukan oleh DPR, tetapi dalam draf versi pemerintah dihapus. Alasannya, hal itu sudah terintegrasi dalam pengertian perlindungan dalam pasal 1 ayat 3.

DPR mengusulkan pelayanan darurat bagi korban, pekerja sosial yang memberikan layanan pemulihan kepada korban, asas dan tujuan yang melandasi UU KDRT akan dibawa ke Panja Komisi VII DPR karena ada perbedaan pengertian antara DPR dengan pemerintah mengenai status pekerja sosial. (rif-t)

**JADWAL ACARA DPR RI  
Tanggal 16 s/d 20 Agustus 2004**

***Senin, 16 Agustus 2004***

Pkl 10.00 WIB Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2004 – 2005 dengan acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangkaian Hut Proklamasi Kemerdekaan ke 59 RI dan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RAPBN tahun 2005 beserta Nota Keuangannya. Di R. Rapat Paripurna Gd. Nusantara MPR/DPR RI. Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

***Selasa, 17 Agustus 2004***

Pkl 09.00 WIB Upacara Memperingati Hut Kemerdekaan

***Rabu, 18 Agustus 2004***

Pkl 09.00 WIB Intern Komisi

***Kamis, 19 Agustus 2004***

Pkl 09.00 WIB Komisi VI Intern Komsu

Pkl 09.00 WIB Komisi VII Intern Komsu

Pkl 11.00 WIB Rapat Kerja Pansus RUU tentang Praktik Kedokteran Laporan Panja ke Pansus

Pkl 09.00 WIB Rapat Panja Pansus RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Panja dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Depkeu (tertutup)

Pkl 09.00 WIB Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri (tertutup)

Pkl 14.00 WIB Panitia Anggaran Rapat Intern

Pkl 14.00 WIB Rapat Bamus (tertutup)

***Jum'at 20 Agustus 2004***

Pkl 14.00 WIB BKSAP mengadakan pertemuan dengan Delegasi Parlemen Yordania yang dipimpin Mr. Nawaf Al Mala di Gedung Nusantara III Lt VI DPR RI

Pkl 09.00 WIB Intern Fraksi

***Jadwal Acara sewaktu-waktu dapat Berubah***

***Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI Tanggal 2004-08-18, Jam 12:46:33***

**JADWAL ACARA DPR RI**  
**Tanggal 23 s/d 27 Agustus 2004**

**Senin, 23 Agustus 2004**

Pkl 13.00 WIB      Komisi I Raker dgn Menhan  
Pkl 12.00 WIB      Komisi VII Raker dgn Meneg PP (RUU KDRT)  
Pkl 14.00 WIB      Komisi VII Raker dgn Menkes (RUU Praktek Kedokteran)

**Selasa, 24 Agustus 2004**

Pkl 09.00 WIB      Rapat Paripurna :  
1. Pemandangan Unum Fraksi atas RUU RAPBN Tahun 2005  
2. Pendapat Fraksi-Fraksi atas 4 Pengadilan Tinggi Agama  
3. Pendapat Fraksi-Fraksi atas Pembentukan Propinsi Aceh Lauser Antara  
Pkl 14.00 WIB      Panitia Anggaran Raker Dgn Menkeu (Pembahasan Lapssem APBN tahun 2004)

**Rabu, 25 Agustus 2004**

Pkl 13.00 WIB      Komisi I Raker dgn Meneg Kominfo  
Pkl 14.00 WIB      Panitia Anggaran Raker Dgn Menkeu (lanjutan)  
Pkl 09.00 WIB      Rapat Tim Perumus Pansus KKR

**Kamis, 26 Agustus 2004**

Pkl 09.00 WIB      Intern Komisi

**Um'at, 27 Agustus 2004**

Pkl 14.00 WIB      Acara Rutin Dialektika Demokrasi  
Intern Komisi dan Fraksi DPR RI

---

**adwal Acara sewaktu-waktu dapat Berubah**  
**agian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI    Tanggal 2004-08-20, Jam 11:42:49**

*[Handwritten signature]*  
20 04



**BUKU SAKU  
WARTAWAN DPR RI**





# Parlamentaria

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



## Menanti Presiden Pilihan Rakyat



**Profil: Agustin Teras Narang,  
Dekat dengan Konstituen**



# Parlementaria

Nomor: 421/XI/2004

Minggu : IV/Agustus/2004

Presiden sampaikan RAPBN 2005 dan Nota Keuangannya:

## TERAPKAN SISTEM PENGANGGARAN TERPADU UNTUK KURANGI KKN

*Presiden Megawati Soekarnoputri saat Pidato Kenegaraan dalam rangkaian HUT Proklamasi RI dan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2005 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2004-2005, di gedung Nusantara DPR, (16/08).*

*Mengungkapkan, dari sisi belanja Negara pemerintah mulai menerapkan system penganggaran terpadu.*

Sistem ini melebur anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran yang menggabungkan belanja rutin (terutama gaji dan belanja barang) dengan belanja pembangunan

dimaksudkan untuk mengurangi alokasi yang tumpang tindih.

"Walau hasilnya mungkin baru dapat dinikmati beberapa tahun lagi, saya yakin upaya ini dapat menghemat dan mengurangi praktek



supriyanto

*Megawati Soekarnoputri*

KKN di bidang keuangan negara. Untuk itu diharapkan Pemerintah Bersambung ke hal. 2

## DPR SESALKAN TIMBULNYA KONFLIK AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH



Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Akbar Tandjung ketika memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun 2004 - 2005 dan Pidato kenegaraan Presiden RI dan

*Ketua DPR Akbar Tandjung prihatin dan menyesalkan timbulnya konflik di wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Selatan sebagai akibat pemekaran wilayah. Peristiwa ini sangat bertolak belakang dengan keinginan bahwa pemekaran wilayah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RAPBN tahun 2005 beserta Nota Keuangan di Gedung

Nusantara DPR RI, Senayan, (16/8). Lebih lanjut Akbar mengatakan, Bersambung ke hal. 3





# Parlementaria

Nomor: 419/XI/2004

Minggu : III/ Juli/2004



Ketua DPR RI Akbar Tandjung didampingi empat unsur pimpinan Wakil Ketua Korpri, Korekku, Kokesra, Korinbang memimpin Rapat Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Persidangan IV 2003-2004, Jumat (16/07).

**Ketua DPR Akbar Tandjung dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV DPR mengatakan, dalam menjalankan fungsi legislasi DPR pada Masa Sidang IV telah menyelesaikan 13 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disetujui menjadi UU.**

Beberapa RUU yang belum di selesaikan akan dilanjutkan pembahasannya pada masa yang berikutnya," kata Akbar Tandjung saat memimpin Rapat Paripurna di gedung DPR RI, Jakarta (16/7).

Dalam laporannya, Akbar juga menyebutkan selama Masa Persidangan

bersambung ke hal 2

## TIGA RUU DISETUJUI LEWAT VOTING

Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas empat buah RUU yaitu RUU tentang Penetapan Perpu No.2/2004 tentang Perubahan UU Pemilu, RUU tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Perubahan atas UU No.5/1991 tentang Kejaksaan dan RUU tentang Penetapan Perpu No.1/2004 tentang Perubahan atas UU No.41/99 tentang Kehutanan Kamis (15/7) berlangsung menarik.

Pasalnya, pengambilan keputusan yang diduga akan berjalan mulus, ternyata cukup alot sehingga harus dilakukan melalui pemungutan suara (voting). Tiga RUU yang akhirnya diambil keputusan melalui voting adalah RUU tentang penetapan Perpu pemilu, RUU Kejaksaan dan RUU

Penetapan Perpu Kehutanan.

Sedangkan satu-satunya RUU yang diputuskan lewat aklamasi yaitu RUU tentang Komisi Yudisial.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeitno diputuskan tiga RUU sedangkan Wakil Ketua DPR AM Fatwa memimpin

bersambung ke hal 3



# Parlementaria

Nomor: 420/XI/2004

Minggu : IV/Juli/2004

## KOMISI II TINJAU PELAKSANAAN DARURAT SIPIL DI ACEH



Komisi II dalam reses masa persidangan IV Tahun Sidang 2003-2004 melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam guna meninjau dari dekat pelaksanaan darurat sipil di NAD pada 19-21 Juli 2003.

Dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI ke NAD Agustin Teras Narang berdasarkan konstitusi, ruang lingkup pengawasan darurat sipil berada di komisi II berbeda dengan ruang lingkup pengawasan darurat sipil yang berada di komisi I.

temuan Tim Kunjungan Kerja Komisi II yang dipimpin Ketua Komisi II A. Teras Narang dengan kil Gubernur NAD Azwar Abubakar di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur NAD, Banda Aceh, in (19/07).

bersambung ke hal 2

## Soetardjo Tegaskan Jabatan Sekjen DPR Harus Orang Dalam

Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dalam acara Lepas-Sambut Sekretaris Jendral (Sekjen) DPR mengatakan pihaknya berjuang keras agar jabatan Sekjen diisi oleh orang dalam. Pasalnya, sempat tersiar kabar bahwa jabatan itu akan diisi oleh orang luar.

"Saya katakan siapa lagi yang akan mengisi jabatan Sekjen, kalau dari luar No. Tidak bisa," katanya disambut tepuk tangan riuh yawan dan mantan pejabat Sekjen DPR RI di lobby gedung Nusantara DPR, Jum'at (23/7).

Pasalnya, menurut Soetardjo Sekjen DPR sangat berbeda dengan Se-kretariat instansi peme-rintah lainnya. Sekjen DPR harus melayani 500 Ang-

bersambung ke hal 3



Wakil Ketua DPR RI/Korpol Soetardjo Soerdjogoeritno menyerahkan kenang-kenangan kepada Mantan Sekretaris Jenderal DPR RI Sitti Nurhajati Daud pada acara Lepas-Sambut di gedung DPR, Jumat (23/07)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Selayang Pandang**



**Biro Humas dan Hukum  
Sekretariat Jenderal DPR - RI  
<http://www.dpr.go.id/humas>**



**Selayang Pandang**

**GEDUNG  
MPR / DPR  
REPUBLIK INDONESIA**

**Biro Humas dan Hukum  
Sekretariat Jenderal DPR - RI**

Film pendek DPR

## **Wakil Rakyat**

(judul sementara)

- Film disajikan kepada pengunjung yang ingin mengenal DPR secara umum.
- Diharapkan dapat menciptakan image yang baik tentang DPR, baik anggota maupun lembaganya.
- DPR ditampilkan dengan kesibukan-kesibukan sidang dan penerimaan masyarakat.
- Dengan film ini penonton akan lebih memahami dan ber-empathy tentang tugas dan wewenang DPR sebagai badan legislatif yang mewakili suara rakyat.
- Disajikan dengan alur cerita yang simple (Waktu max. 15 menit)

**Story board / alur cerita  
Film Pendek DPR-RI**

**Wakil Rakyat**  
**(judul sementara)**

**Humas, 26 Agust. 2004**

## Day 1

Surya, si wartawan pemula yang idealis, mendapat tugas yang bukan bidangnya. Meliput DPR!



“Cita-citaku ‘kan menjadi wartawan musik!!”

Waktunya hanya 3 hari, sementara dia tidak tahu apapun soal DPR.

## Surya, si Wartawan Pemula



## Buku PMP SMP

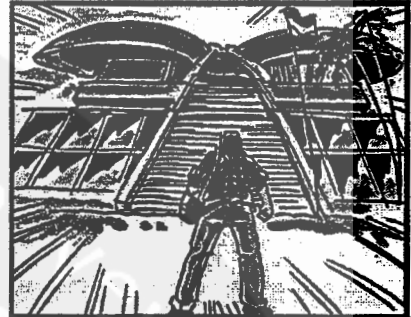
- Panik!!! Dia mencoba membongkar buku pelajarannya sewaktu masih SMP.
- Buku PMP!
- Sayang... sudah tidak *up to date* lagi...



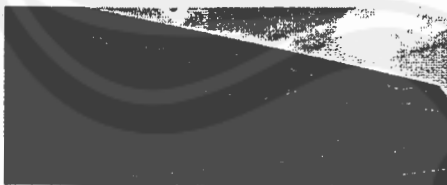
## Hubungi Humas DPR !!

- Surya menelpon Humas DPR (Sinta) untuk meminta informasi tentang DPR
- Sinta mempersilahkan untuk berkunjung ke DPR agar mendapat informasi lebih lengkap tentang DPR.

## Kunjungan Pertama



## Day 2

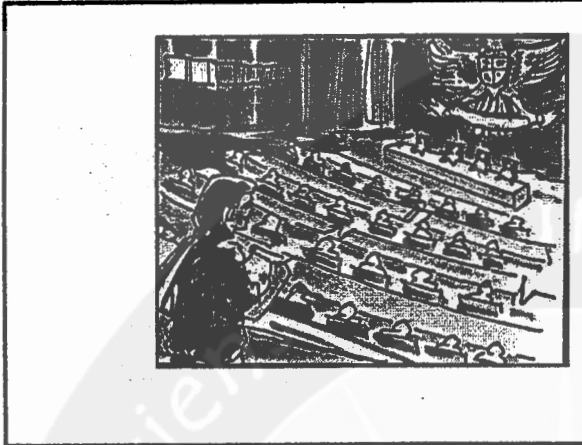


## Kagum...

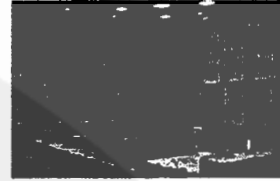


Surya tiba di halaman kompleks DPR.... Wow....dia kagum akan suasana di DPR.





Catatan : Tidak memvisualkan ruang kosong



Surya juga melihat Rapat Komisi yang sedang berlangsung

Surya menyadari bahwa tugas Anggota DPR sungguh berat

Dia harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang DPR.

Untuk melengkapi informasi dari Sinta maka disarankan ke Perpustakaan DPR

Catatan : Tidak memvisualkan ruang kosong



- Surya melongok Ruang Sidang Paripurna, Ia membayangkan bagaimana suasana ketika Sidang Paripurna sedang berlangsung.



Perpustakaan

## Sejarah DPR



Buku pertama yang menarik perhatiannya: *Seperempat Abad DPR-RI*. Sebuah foto yang menunjukkan sejarah terbentuknya DPR menarik perhatiannya. Dia menenggelamkan dirinya dalam tumpukan buku.

- Sejarah DPR dijelaskan bagaimana KNIP terbentuk sampai DPR saat ini. Kemudian dijelaskan dalam bentuk gambar / visual pembangunan lengkap gedung DPR.

Waktunya Pulang...



- Surya melewati beberapa ruang sidang yang terlihat masih hangat dengan perdebatan.
- Dia mengagumi anggota DPR yang bekerja sampai larut malam melebihi jam kerja orang biasa.

Kemudian di penghujung pertemuan Sinta itu masih mempersilakan untuk datang lagi ke Humas untuk informasi DPR yang lebih detail.

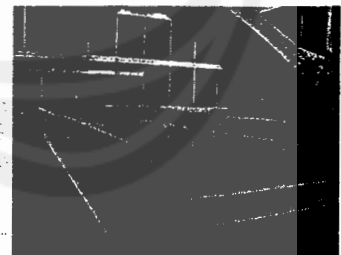
(tidak sempat menentukan jam pertemuan besok)

### Perjalanan Pulang

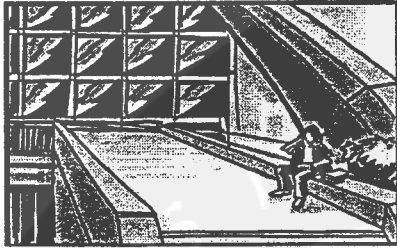
- Surya berjalan menuju keluar kompleks, berpapasan dengan petugas Sinta yang juga mau pulang. Kemudian Sinta itu bersama-sama pulang (berjalan dari depan Gd. Nusantara ke halte bis depan BNI). Obrolan mereka begitu intens... Dan berpisah di depan pintu gerbang depan DPR

Tentang :

- Tata cara pengambilan keputusan menjelaskan konsep musyawarah untuk mufakat, pemungutan suara terbanyak bilalidak terjadi kemufakatan
- Pembentukan undang – undang penjelasan pembentukan UU sebagai wujud fungsi legislatif. Pembentukan UU ini secara garis besar terbentuk atas usulan dari pemerintah atau DPR.



Day 3



### Kesempatan Wawancara !!!!!

- Lamunan Surya dibuyarkan dengan adanya telpon dari Sinta yang mengabarkan berita bahwa Ketua DPR jam 14:00 akan menerima delegasi masyarakat.
- Terbuka untuk wawancara dengan Pimpinan DPR
- Masih ada waktu untuk melengkapi informasi tentang DPR (Sambil menunggu waktu) di media center

### Sambil Menunggu...

- Surya menunggu di depan pintu masuk gedung Paripurna, mengeluarkan data yang telah diperolehnya dan mempelajarinya, ia juga seperti sesekali teringat pelajaran SMP-nya dulu yang menjelaskan tentang hak DPR.
- penjelasan singkat mengenai Hak-hak DPR (mengajukan RUU; mengadakan perubahan atas RUU; mengadakan pembahasan APBN; interpelasi; angket; menyatakan pendapat; dan menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan.

### DPR untuk Rakyat

- Sambil berjalan menuju ruang media center, Sinta menjelaskan peran DPR sebagai penyambung aspirasi rakyat.
- Aspirasi dan pengaduan masyarakat menjelaskan bagaimana DPR menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- Masyarakat dapat secara langsung datang ke DPR atau melalui surat.

Catatan : Penerimaan delegasi masyarakat  
Tidak mungkin di-skenario-kan



## Website



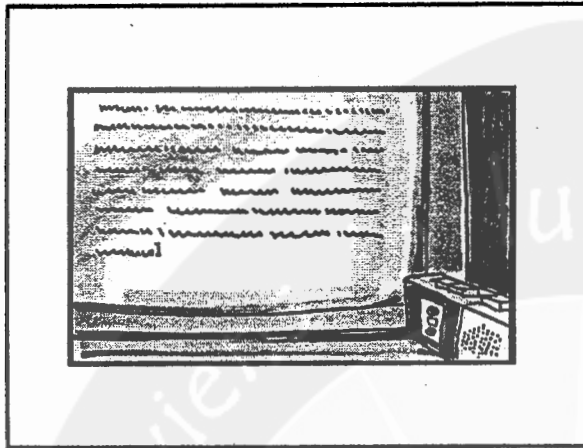
- Di Media center, Surya mendapat banyak informasi mengenai DPR.
- Ia mengeluarkan alat perekamnya kemudian merekam informasi yang ia temukan.
- Surya terlalu asyik dengan informasi yang didapat, dan LUPA WAKTU !!!

## Web site DPR

- Sinta menyarankan untuk melengkapi data itu dengan melihat website DPR di media center.

## LUPA WAKTU

- Tiba-tiba, Surya dihubungi Pimpinan Redaksi untuk menanyakan perkembangan liputan.
- Surya KAGET !!! dan baru menyadari jam di tangannya sudah menunjuk pukul 14:50
- Surya bergegas menuju ruang pertemuan, tanpa menyadari alat perekamnya yang tertinggal !!!.



Catatan : ilustrasi tidak tepat sebab ruang media center berada satu gedung dengan ruang pertemuan



### Insiden Alat Perekam

- Surya sampai di depan ruang pertemuan.
- Ia menunggu, gelisah....Tiba-tiba ia menyadari alat perekamnya masih tertinggal di media center. Ia berlari cepat... ke media center untuk mengambil alat perekamnya, berlari lagi ke ruang pertemuan...

### Rapatnya mana????

- Tiba kembali di ruang pertemuan, acara sudah selesai, kesempatannya sudah hilang untuk wawancara dengan Ketua DPR...



### Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

- Kecewa...telepon Surya berbunyi... pimpinan Redaksi mengabarkan deadline untuk liputan dimajukan jadi jam 21.00 malam ini!

### Tak disangka....

- Dengan langkah gontai tak tau harus berbuat apa... Surya mengakhiri usahanya untuk menyelesaikan liputan ini.....

.....  
.....  
.....



Catatan : Surya gontai masuk lift



Setelah masuk lift, pada saat pintu akan tertutup, tiba-tiba ada gerakan tangan yang menahan pintu lift, dan pintu lift terbuka kembali



Seseorang mau ikut masuk lift



- Yang masuk lift ..... ternyata Tokoh DPR (Pak Dewanto) yang selama ini ia cari !





- Bongkar ransel, siapkan alat perekam
- :” Pak... saya sudah lama ingin bertemu Bapak untuk wawancara tentang.....”



- Pak Dewanto ternyata sangat ramah....  
Wawancara berlangsung dengan santai sambil mereka berjalan di lobby..... Sesekali berhenti di loby ....
- Menuju mobil
- Surya mengucapkan Terima kasih

## **ENDING**

**Surya kembali menemui Sinta :**

- Surya mengucapkan terima kasih
- Memuji Pak Dewanto yang masih menyempatkan untuk diwawancarai dan mencerminkan keterbukaan terhadap rakyat.

**Sinta menjelaskan :**

- bahwa Acara DPR memang padat sekali
- Bila perlu informasi lagi silakan menelpon atau datang langsung ke Humas
- Humas siap membantu siapa saja yang membutuhkan informasi tentang DPR

